DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

YUK SELAMAT BERSAMA

MAU TAU KENAPA MUDIK DITIADAKAN??

MASIH TINGGINYA ANGKA KASUS AKTIF COVID-19 DI INDONESIA

MOBILITAS MASYARAKAT SAAT LIBUR PANJANG SELALU BERDAMPAK PENINGKATAN KASUS AKTIF COVID-19 DI INDONESIA

MEREBAKNYA KASUS AKTIF COVID-19 GELOMBANG KE TIGA DI BEBERAPA NEGARA LAIN

ADANYA RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA JULI 2021

Tidak Mudik
untuk Indonesia yang Lebih Baik

Ditjen Perhubungan Darat | ditjen_hubdat | hubdat151 | Hubdat.dephub.go.id | 151

EDISI TRIWULAN 01 / 2021

NEWSLETTER
infoHUBDAT
Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

INFO KHUSUS

Mengawal Transportasi Darat di Tanah Rencong

GAS POL BERANTAS ODOL

YUK SELAMAT BERSAMA

Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

KAMI JUGA RINDU,

TAPI SEMENTARA JANGAN PULANG DULU SAMPAI SEMUA BERLALU

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hubdat hubdat151 Hubdat.dephub.go.id 151

YUK SELAMAT BERSAMA

Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

KALAU SAYANG KELUARGA

TUNDA DULU MUDIKNYA.

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hubdat hubdat151 Hubdat.dephub.go.id 151

Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman? Masih di tengah masa pandemi ini, kita bersua kembali melalui edisi pertama *Newsletter* infoHUBDAT Tahun 2021. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dengan harapan dapat menjadi bahan catatan dan refleksi kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.

Pembaca yang budiman, grafik pandemi Covid-19 belumlah melandai, bahkan justru diprediksi akan terjadi gelombang kedua. Di India ledakan kasus Covid-19 sangat dahsyat, fasilitas kesehatan kewalahan menangani pasien Covid-19, angka kematian akibat infeksi virus Covid-19 sangat tinggi. Belum lagi munculnya varian-varian baru virus ini. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya festival keagamaan di India yang menimbulkan kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan.

Tak ingin seperti India, maka pemerintah memutuskan untuk meniadakan mudik tahun ini. Pelarangan mudik dimulai 6 hingga 17 Mei 2021. Keputusan ini tentu menuai banyak kontroversi dan konsekuensi. Seperti tahun lalu, masyarakat diharapkan tidak mudik pada saat lebaran. Silaturahmi fisik dapat digantikan dengan silaturahmi virtual tanpa menghilangkan esensinya. Namun demikian pemerintah tidak menutup total akses transportasi, karena distribusi logistik yang penting bagi lajunya roda perekonomian tetap dibutuhkan. Diharapkan dengan keputusan meniadakan mudik, dapat menghindarkan bangsa ini dari gelombang pandemi. Tidak mudik, untuk Indonesia lebih baik.

Pembaca sekalian, terkait tugas pokok dan fungsi, salah satu komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah mewujudkan Indonesia Zero ODOL 2023. Pemerintah bersama *stakeholder* terkait telah sepakat untuk membebaskan Indonesia dari aksi-aksi kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan dimensi. Oleh karena itu kita terus menerus menggemakan seruan untuk menghentikan praktek ODOL. Salah satunya dengan melakukan normalisasi kendaraan yang *over* dimensi di berbagai daerah. Memodifikasi kendaraan, dengan menambah panjang, lebar, atau tinggi bak muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah pelanggaran hukum. Untuk memberi efek jera, kasus-kasus *over* dimensi telah pula berujung pidana. Namun kami juga mengapresiasi, beberapa pengusaha dengan kesadaran sendiri, melakukan normalisasi kendaraannya yang over dimensi. Diharapkan, langkah ini dapat diikuti oleh pelaku usaha lainnya.

Masih banyak tugas yang menanti untuk dikerjakan, masih banyak masalah yang menunggu untuk diselesaikan. Namun tetaplah bersemangat, dan lakukanlah tugas dengan ikhlas hati. Saya sampaikan juga himbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, jika keluar rumah, selalu kenakan masker, dan terapkan protokol kesehatan. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

NEWSLETTER
infoHUBDAT
Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

Foto Cover:
HMS DJPD/BYU

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan pemotongan kendaraan truk tangki yang *over* dimensi di Terminal Bus Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, 16/2/2021.

PENANGGUNG JAWAB
Marta Hardisarwono

REDAKTUR PELAKSANA
Endy Irawan

REDAKTUR UTAMA
Pitra Setiawan
Nanang Rahardjo
Aznal

REDAKTUR
Ardian Sukmaji
Dinda Siahaan
Alvia Lilian
Hanna Suryadika

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI
M. Aulia Dharma
Herman Wibowo
Bayu Adi Saputro
Andrew Bryan Agustinus

SEKRETARIAT
Bejo Sri Wahono
Ratna Syaka Aprilda
Sari Hayu Hutami
Ely Rusnita
Nurhayati
Yudha Kurniawan
Kurniadi Zaini
Didik Prasetyo
Rifai Dyan Armananta
Nolita
Rusdinal
Achmad Nanang
Rosmala Damayanti
Nova Yulianasari Sopiah
Reza Saputra
Nurfadilah Sinta Ningrum
Ade Yunita
Rajib

KONTRIBUTOR
Junedi Sembiring
Nurita Aprilianing Tyas
Marisa
Wahyu Arya Putra
Prisca Magdalena Samosir
Arief Eko Sumba
Cristian Andri Mardhani
Laurence
Erlieka Affan
Ririn Scorviyanti
Rinto Mahendra Raharjo

Diterbitkan oleh:

Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Gedung Karya Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : humas.hubdat@gmail.com

website : http://hubdat.dephub.go.id/

@hubdat151
ditjen perhubungan darat
@ditjen_hubdat
ditjen perhubungan darat

Info **Redaksi**

Janganlah lengah, sekarang masih wabah.
Jangan menyerah, meski ada wabah, tetaplah tabah.

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Kita masih berada di tengah wabah. Pandemi belumlah pergi. Namun kita tak boleh menyerah. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, kita bisa beraktivitas kembali meraih mimpi-mimpi yang sementara ini terhenti. Tetap patuh pada protokol kesehatan, seraya terus memutar roda perekonomian. Semoga pandemi segera berhenti.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menampilkan Laporan Utama mengenai upaya Ditjen Perhubungan Darat yang terus menerus menyerukan Stop ODOL (Over Dimensi Over Load)! Edisi bertajuk Gas Pol Berantas ODOL ini menguraikan keseriusan Ditjen Perhubungan Darat demi mewujudkan Indonesia Zero ODOL 2023. Beberapa artikel telah kami siapkan untuk mendukung laporan utama, antara lain: Semangat Normalisasi Over Dimensi, dan Kolaborasi Penanganan ODOL.

Kemudian, kami sajikan pula liputan khusus tim infoHUBDAT ke BPTD Wilayah I Aceh dengan artikel Mengawal Transportasi Darat di Tanah Rencong. Dalam rubrik ini, beberapa artikel pendukung kami sajikan, antara lain: Pengusaha Angkutan di Aceh Sukarela Potong Truk Sendiri; Peran BPTD Aceh Mengelola Transportasi Darat.

Tak kalah menarik, ulasan mengenai Dukungan Pada Pengusaha Otobus Untuk Terus Bangkit di Tengah Pandemi. Selain itu juga artikel tentang beratnya tugas angkutan perintis dalam merajut konektivitas wilayah-wilayah terisolir dan pedalaman melalui artikel Bus Perintis yang Merintih. Diikuti dengan tulisan dari pengamat transportasi yang *concern* pada angkutan pariwisata dengan artikel bertajuk Manajemen Angkutan Pariwisata Perlu Dibenahi.

Kami sajikan pula artikel mengenai peresmian Dermaga II Pelabuhan Bolok dan 2 Unit Kapal untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga kami sajikan ulasan mengenai E-BLU, sebuah alat pembaca kartu BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik).

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian.(*)

daftar isi
EDISI TRIWULAN 01 / 2021

Potong Disini
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan pemotongan/normalisasi kendaraan yang *over* dimensi di Palembang, Sumatera Selatan, 27 Februari 2021. Foto: HMS DJPD/WBW

Info **Utama**

04 GAS POL BERANTAS ODOL
Kemenhub dan Kemenperin telah bersepakat akan memberlakukan pengecualian untuk kendaraan ODOL yang mengangkut 5 komoditas berikut: semen, baja, kaca lembaran, beton ringan, air minum dalam kemasan hingga maksimal tahun 2022. Meski demikian pada ruas jalan tertentu akan tetap diberlakukan larangan ODOL.

06 Semangat Normalisasi *Over* Dimensi
16 Kolaborasi Penanganan ODOL

Info **Khusus**

16 Mengawal Transportasi Darat di Tanah Rencong
18 Pengusaha Angkutan di Aceh Sukarela Potong Truk Sendiri
20 Peran BPTD Aceh Mengelola Transportasi Darat

Info **Angkutan**

22 Dukungan Pada Pengusaha Otobus Untuk Terus Bangkit Di Tengah Pandemi
23 Sumatera *Roadshow* 2021, Upaya Bangkitkan Industri Transportasi Darat
24 Bus Perintis yang Merintih
26 Manajemen Angkutan Pariwisata Perlu Dibenahi

Info **Sarana**

30 *E-Blu Reader* Si Pembaca Kartu BLUe
33 Penjara Bagi Pemalsu BLUe

Info **TSDP**

34 Peresmian Dermaga II Pelabuhan Bolok dan 2 Unit Kapal Untuk NTT

Info **Prasarana**

36 Menhub Kunjungi Terminal Harjamukti Cirebon

Info **Lalu Lintas**

37 Ditjen Hubdat Terbitkan SE Pembatasan Operasional Angkutan Barang Selama Perbaikan Tol Cipali

Info **Selintas**

37
- Menhub Resmikan Dermaga II Telaga Punggur di Batam
- Ditjen Hubdat Terbitkan SE Pembatasan Operasional Angkutan Barang Selama Perbaikan Tol Cipali
- Antisipasi Cuaca Buruk, Ditjen Hubdat Koordinasikan Simulasi Gangguan Sistem Transportasi
- Dirjen Hubdat Konfirmasi KMP. Dorothy Sempat Kandas di Merak
- Pemberdayaan Masyarakat Lewat Padat Karya di UPPKB Trosobo
- Kecelakaan Bus Pariwisata di Sumedang, 27 Orang Meninggal Dunia
- Kemenhub Dirikan Posko dan Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Sulbar
- Padat Karya Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Lensa **Hubdat**

41 Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan pemotongan kendaraan truk tangki yang *over* dimensi di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau 16/2/2021. Foto: HMS DJPD/BYU

GAS POL BERANTAS ODOL

Oleh: Tim info**HUBDAT**

Kemenhub dan Kemenperin telah bersepakat akan memberlakukan pengecualian untuk kendaraan ODOL yang mengangkut 5 komoditas berikut: semen, baja, kaca lembaran, beton ringan, air minum dalam kemasan hingga maksimal tahun 2022. Meski demikian untuk ruas jalan tertentu, seperti Jakarta-Cikampek dan Gresik akan tetap diberlakukan Zero ODOL atau tidak ada toleransi terhadap ODOL.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita memperhatikan usulan Menteri perindustrian namun demikian, Kementerian Perhubungan tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi permintaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menunda pembebasan angkutan *Over Dimension* dan *Over Loading* (ODOL).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, menjelaskan bahwa dispensasi yang diminta Kemenperin telah disepakati untuk diambil jalan tengahnya. “Kami, Kemenhub dan Kemenperin telah bersepakat akan memberlakukan pengecualian untuk kendaraan ODOL yang mengangkut 5 industri pengangkut komoditas berikut: semen, baja, kaca lembaran, beton ringan, air minum dalam kemasan hingga maksimal tahun 2022. Meski demikian untuk ruas jalan tertentu, seperti Jakarta-Cikampek dan Gresik akan tetap diberlakukan *Zero* ODOL atau tidak ada toleransi terhadap ODOL,” jelas Dirjen Budi.

Sebelumnya dalam surat yang dikirimkan oleh Menperin pada 31 Desember yang lalu, tertulis bahwa Kemenperin meminta peninjauan kembali dan penyesuaian waktu kebijakan *Zero* ODOL hingga 2023-2025.

Namun meski demikian, sesuai arahan Menhub, akan difinalkan lebih lanjut, koreksi Dirjen Budi menegaskan bahwa dari jalan tengah ini diharapkan semua pihak baik Pemerintah maupun

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, bersama Gubernur Riau, Syamsuar usai melakukan penandatanganan Deklarasi Mendukung Pelaksanaan Zero Over Dimensi Over Loading (ODOL) Tahun 2003 di Provinsi Riau, 16/2/2021. Foto: HMS DJPD

para pengusaha angkutan barang dan logistik dapat mengantisipasi kebijakan *Zero* ODOL ini karena yang dapat ditolerir hanyalah dari segi waktu penerapannya saja serta hanya diberlakukan untuk 5 jenis industri di atas.

Untuk jenis angkutan barang pengangkut komoditas selain 5 industri tersebut, Dirjen Budi menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap memberlakukan *Zero* ODOL per 2021 sesuai dengan *road map Zero* ODOL yang sudah dirancang Kemenhub sejak tahun 2017.

Dirjen Budi menjelaskan, “Kemenhub sudah merancang road map tersebut bersama para pemangku kepentingan seperti APTRINDO, Organda, dan Pemerintah Daerah maupun Kementerian dan Lembaga lainnya untuk mendukung program Zero ODOL pada tahun 2018 lalu. Dari para pelaku di asosiasi pun pada saat itu sudah setuju. Bagi kami, ODOL tak semata mengenai industri tapi juga keselamatan,” urainya.

Dirjen Budi menjabarkan bahwa dengan adanya truk ODOL, maka keselamatan masyarakat umum maupun pengguna jalan lainnya terancam. Demikian pula dengan kondisi kerusakan jalan, mengutip data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kerugian ini mencapai Rp43 Triliun. Berdasarkan data dari Korlantas Polri (*Integrated Road Safety Management System*/ IRSMS) tentang kecelakaan tahun 2018, Truk ODOL menjadi salah satu penyumbang terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas.

“Kami telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan, maka kami imbau kepada pengusaha angkutan barang dan logistik untuk mempersiapkan kendaraannya sesuai ketentuan yang tercantuk dalam PM 60/2019,” imbau Dirjen Budi.

Selain itu Dirjen Budi menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menghadirkan Tanda Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) untuk memperketat pengawasan terhadap uji berkala atau uji kir setiap 6 bulan sekali yang harus dilakukan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) oleh pemilik angkutan barang. “Dengan adanya BLUe ini diharapkan juga mampu untuk mengawasi hingga ke depannya dapat mengurangi truk ODOL,” pungkas Dirjen Budi.(*)

SEMANGAT NORMALISASI KENDARAAN *OVER* DIMENSI

Kementerian Perhubungan semakin gencar dan optimis dalam melaksanakan program *Zero Over Dimension Over Loading* (ODOL) di tahun 2023 mendatang. Untuk menunjang program tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan normalisasi kendaraan angkutan barang yang memiliki dimensi melebihi ketentuan di berbagai daerah.

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan pemotongan kendaraan *dump truck* yang *over* dimensi di Palembang, Sumatera Selatan, 27/2/2021. Foto: HMS DJPD/ WBW

Selama kurun Januari - Maret 2021 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menggiatkan normalisasi kendaraan *over* dimensi di berbagai daerah. Setidaknya terdapat 7 kegiatan di 7 daerah yang tersebar di Jawa dan Sumatera dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Ke 7 daerah tersebut adalah Jambi, Riau, Palembang, Merak, Gresik, Bogor, dan Aceh.

Normalisasi Kendaraan *Over* Dimensi di Jambi

"Pada hari ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan angkutan ODOL telah dilaksanakan proses Normalisasi Kendaraan Barang *Over Dimension Over Loading* (ODOL) sebanyak 2 (dua) unit kendaraan," kata Dirjen Budi di kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi pada Jumat (29/01).

Kedua truk yang dinormalisasi tersebut yakni:

1). Merek MITSUBISHI, Nomor Polisi BH. 8968 AV, ukuran eksisting : 12.300 mm, ukuran standar : 8.515 mm, kelebihan : 3.785 mm.

2). Merek HINO, Nomor Polisi BH. 8965 MH, tinggi bak eksisting : 1.800 mm, ukuran standar : 1.000 mm, kelebihan : 800 mm.

"Gerakan (normalisasi truk ODOL) ini kita harap tidak berhenti sampai di sini. Sebelumnya sudah ada di Padang, Pekanbaru, Semarang, dan Palembang. Kendaraan- kendaraan ODOL tersebut dapat merugikan banyak pihak, tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, namun negara turut dirugikan dengan anggaran untuk perbaikan jalan yang rusak akibat banyak kendaraan yang ODOL," lanjutnya.

Dengan gencarnya normalisasi kendaraan ini diharapkan ke depannya dapat memberi efek jera sehingga dapat memberantas dan mewujudkan pelaksanaan Indonesia Zero ODOL 2023

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah V Provinsi Jambi, Bahar dalam kesempatan yang sama menyatakan, "Sebelumnya kami sudah melakukan upaya secara masif untuk mewujudkan program keselamatan zero ODOL dengan melaksanakan sosialisasi kepada karoseri dan unit pengujian berkala dan pada hari ini dilaksanakan proses Normalisasi Kendaraan Barang *Over Dimension Over Loading* (ODOL) sebanyak 2 (dua) unit kendaraan. Dengan demikian diharapkan dapat sebagai contoh agar kepada pemilik kendaraan barang dan pengusaha transportasi barang yang memiliki kendaraan ODOL untuk segera melakukan normalisasi kendaraannya sesuai ketentuan," kata Bahar melalui laporannya.

Normalisasi Kendaraan *Over* Dimensi di Pekan-baru, Riau

Kementerian Perhubungan melakukan normalisasi terhadap angkutan barang *Over Dimension Over Loading* (ODOL) di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS), Pekanbaru, Riau. Sebanyak 4 unit kendaraan dipotong mengikuti ketentuan ukuran dimensi pada Selasa (16/2).

"Menyangkut ODOL saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau-Kepulauan Riau. Sekarang secara bertahap normalisasi sudah dilakukan di beberapa wilayah BPTD seperti Jambi, Padang, Lampung, dan wilayah lain yang kita harapkan melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Tilang belum memberikan efek jera, saya perhatikan instrumen yang memberi jera adalah imbauan dan juga pasal 277 (UU Nomor 22 Tahun 2009) karena ada hukuman dan denda yang dikenakan pada operator dan karoseri. Dalam kesempatan ini saya melihat semangat kawan-kawan asosiasi, operator, dan Pemerintah Daerah di Riau dan ada kemauan untuk normalisasi," kata Dirjen Budi saat menyampaikan sambutannya.

Normalisasi Kendaraan Barang *Over Dimension Over Loading* (ODOL) hari ini dilakukan terhadap 4 unit kendaraan dengan jenis kendaraan : 2 Unit Kendaraan Tangki BBM, 1 Unit Kendaraan Tangki CPO, dan 1 Unit *Dump Truck*. Kendaraan tersebut dikembalikan ukurannya sesuai standar. Dengan demikian diharapkan ke depannya dapat dijadikan contoh kepada pengusaha transportasi barang yang memiliki kendaraan ODOL untuk segera melakukan normalisasi kendaraannya sesuai ketentuan guna mewujudkan Negara Indonesia Bebas ODOL Tahun 2023.

Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi menjelaskan jika pihaknya akan memperketat pengujian kendaraan yang ada di daerah-daerah untuk mencegah adanya kendaraan ODOL. "Paling banyak

kendaraan ODOL yang ada yaitu *dump truck.* Kami sekarang sedang menertibkan pengujian di kabupaten/kota, kalau tidak sesuai akreditasi akan kami tutup sambil mereka melengkapi alat dan petugas berkompetensi, karena semua ini arahannya untuk keselamatan. Kami saat ini sedang membuat Peraturan Menteri Perhubungan penjabaran *omnibus law* sehingga terbuka peluang swasta, bengkel atau agen pemegang merek (APM) boleh mendirikan pengujian. Kami harapkan Pemerintah kabupaten/kota harus serius dalam menerapkan ketentuan ini," urai Dirjen Budi.

Untuk mencapai Indonesia Bebas ODOL Tahun 2023 berbagai cara dilakukan Ditjen Hubdat untuk memperbaiki ekosistem dari hulu sampai hilir mengenai perbaikan angkutan barang melalui beragam upaya antara lain penanganan ODOL berupa Penegakan Hukum di UPPKB dan transfer muatan kendaraan yang biayanya dibebankan pada operator, Penindakan P21 terhadap kendaraan ODOL, Kebijakan Normalisasi Kendaraan, sistem penerbitan SRUT kendaraan secara online hingga penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pada Pengujian Kendaraan Bermotor.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau- Provinsi Kepulauan Riau, Ardono dalam laporannya pada kegiatan tersebut menjabarkan, "Secara keseluruhan kendaraan yang telah dinormalisasi oleh BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau total berjumlah sebanyak 209 unit kendaraan yang telah dinormalisasi dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan Januari tahun 2021. Di luar angka-angka yang telah saya sebutkan diatas, saat ini masih banyak kendaraan-kendaraan milik para pengusaha transportasi di Provinsi Riau yang jumlahnya mencapai ratusan unit bahkan mungkin ribuan yang sebenarnya perlu dinormalisasi," kata Ardono.

Ardono menambahkan pada akhir tahun 2018 BPTD Wilayah IV Riau dan Provinsi Kepulauan Riau telah selesai mekasanakan P21 terhadap 2 unit kendaraan ODOL. Dalam upaya penanganan ODOL lebih lanjut BPTD Wilayah IV Riau konsisten melaksanakan Pengawasan dan Penegakan Hukum atau Gakum yang dilaksanakan pada ruas Jalan Nasional dan pada ruas Jalan Tol Pekanbaru–Dumai dengan hasil penilangan sebanyak 378 kendaraan yang melakukan pelanggaran.

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan pemotongan kendaraan yang *over* dimensi di Gresik, Jawa Timur, 17/3/2021. Foto: HMS DJPD/WBW

Normalisasi Kendaraan *Over* Dimensi di Palembang

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi bersama Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menindak tegas dengan melakukan normalisasi atau pemotongan 3 (tiga) unit kendaraan guna memberi efek jera bagi pelanggar ODOL di Palembang, Sumatera Selatan, pada Sabtu (27/2).

"Pada hari ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan kendaraan ODOL telah dilaksanakan proses normalisasi kendaraan pelanggar ODOL sebanyak 3 (tiga) unit. Dengan data kendaraan terdiri dari 2 unit mobil tangki dan 1 unit mobil barang *(Dump Truck)* pengangkut batu bara," kata Dirjen Budi.

Lanjutnya, kendaraan tersebut dikembalikan ukurannya sesuai standar dan diharapkan ke depannya dapat dijadikan contoh kepada pengusaha transportasi barang yang memiliki kendaraan ODOL untuk segera melakukan normalisasi. "Kendaraan-kendaraan ODOL ini dapat merugikan banyak pihak, tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, namun negara turut dirugikan dengan anggaran untuk perbaikan jalan yang rusak akibat banyak kendaraan ODOL," ujar Dirjen Budi.

Bersamaan dengan kegiatan normalisasi kendaraan, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Herman Deru juga mendeklarasikan mendukung pelaksanaan Zero ODOL di Provinsi Sumatera Selatan. "Bersamaan ini Provinsi Sumatera Selatan sepakat mendukung sepenuhnya terhadap penegakan hukum dalam rangka

Kepala BPTD VII Sumselbabel, M. Fahmi, menandatangani Deklarasi Mendukung Pelaksanaan *Zero Over Dimension Over Loading* di Provinsi Sumatera Selatan, 27/2/2021. Foto: HMS DJPD

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, disaksikan oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan, Risal Wasal, dan Kepala BPTD XI Jawa Timur, Tonny Agus Setiono, menandatangani Deklarasi Mendukung Pelaksanaan *Zero Over Dimension Over Loading* di Gresik, Jawa Timur, 17/3/2021. Foto: HMS DJPD/WBW

Zero ODOL di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan," tutur Herman.

Herman menambahkan apabila para pengusaha masih tetap ego melakukan pelanggaran ODOL lebih baik menggunakan jalan pribadi agar tidak merusak jalan nasional, provinsi, maupun jalan lainnya yang telah diperbaiki.

"Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Perhubungan Darat yang telah menginisiasi deklarasi ini karena telah membantu pemerintah provinsi semakin bersemangat untuk menyelaraskan antara standarisasi konstruksi infrastruktur jalan dengan standarisasi batas angkutan jadi apabila kedua hal tersebut beriringan bersama saya yakin apa yang dibangun bisa bertahan lama dan masyarakat yang menggunakan jalan akan merasa selamat," terang Herman.

Turut hadir dalam acara ini Direktur Sarana Transportasi Jalan, Risal Wasal, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Provinsi Sulawesi Selatan-Bangka Belitung, Muhammad Fahmi, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Ari Narsa, dan Seluruh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Normalisasi Kendaraan *Over* Dimensi di Merak

Normalisasi atau pemotongan terhadap 2 (dua) unit kendaraan pelanggar ODOL di Merak, Banten dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan, Senin (15/3).

Pada kesempatan ini Dirjen Budi mengapresiasi kepada PT Java Taiko Industries dan PT Mufid Inti Global yang telah bersedia untuk dilakukan normalisasi kendaraannya.

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan pemotongan kendaraan truk yang *over* dimensi milik PT Mufid Inti Global di Merak, Banten, 15/3/2021.
Foto: HMS DJPD

Ada pun kedua truk yang dinormalisasi tersebut yakni:

1). Milik PT Java Taiko Drum Industries, Merek MITSUBISHI, Nomor Polisi A 8169 VX;

2). Milik PT Mufid Inti Global, Merek HINO, Nomor Polisi B 9058 FYX.

Selain itu dalam laporannya, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, Endi Suprasetio mengatakan, tindakan transfer muatan terhadap truk yang *over loading* sudah dilakukan sesuai arahan Dirjen Perhubungan Darat di mana kendaraan harus putar balik kembali ke tempat asal, transfer muatan, atau jika sudah kelewatan akan diproses hukum atau P21.

"Nantinya kendaraan-kendaraan yang melanggar akan dikembalikan ukurannya sesuai standar. Dengan demikian diharapkan sebagai contoh agar kepada pengusaha transportasi barang yang memiliki kendaraan ODOL untuk segera melakukan normalisasi kendaraannya sesuai ketentuan," tegas Dirjen Budi.

Turut hadir dalam acara ini Direktur Sarana Transportasi Jalan, Risal Wasal, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah, Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, serta perwakilan lintas instansi seperti Perwakilan Polda Banten, Perwakilan Kementerian PUPR, Basarnas, dan sejumlah asosiasi terkait.

Normalisasi Kendaraan *Over* Dimensi di Gresik

Dalam kunjungan kerja ke wilayah Jawa Timur pada Rabu (17/3), Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan normalisasi terhadap 2 unit dari 102 truk di PT. Sumber Karya Abadi, Gresik, Jawa Timur. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan angkutan ODOL dilaksanakan proses Normalisasi Kendaraan Barang ODOL terhadap 102 unit kendaraan yang akan dinormalisasi dengan Jenis kendaraan : Tangki, *Dump Truck*, dan Muatan Terbuka. Keseluruhan kendaraan tersebut didapatkan dari be-

ragam perusahaan dan pemilik kendaraan yang secara sukarela menyerahkan kendaraannya untuk dinormalisasi.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur, Tonny Agus Setiono melalui laporannya menyatakan, “Pada bulan Januari-Maret, BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur melalui 11 UPPKB telah melakukan penilangan terhadap 6.991 kendaraan bermotor dan 223 kendaraan yang dilakukan transfer muatan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan jaminan keselamatan bagi para pengemudi dan pengguna jalan lainnya sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan akibat kendaraan ODOL. Yang kedua, dapat mengurangi tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan anggaran pemeliharaan dapat dialihkan untuk kegiatan prioritas lainnya.”

Acara hari ini dihadiri oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan, Risal Wasal, Direktur Lalu Lintas Jalan, Suharto, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, Kasubditkamsel Polda Jatim, M.Z Rofik, DPD Organda Jawa Timur, H.B. Mustafa, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, dan Direktur PT. Sumber Karya Abadi, Agustin Vitasari.

Normalisasi Kendaraan *Over* Dimensi di Bogor

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi kembali melakukan pemotongan atau normalisasi terhadap 10 (sepuluh) unit kendaraan yang merupakan hasil penindakan dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kemang, UPPKB Balonggandu, dan UPPKB Losarang, pada Rabu (24/3).

Dirjen Budi menegaskan, “Sebagaimana kita ketahui transportasi merupakan urat nadi perekonomian. Jika transportasi terganggu maka perekonomian nasional juga akan terganggu. Kita sadari dampak dari pelanggaran ODOL semakin dirasakan, guna mewujudkan hal tersebut maka seluruh UPPKB yang berada di bawah pembinaan Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan langkah – langkah penertiban melalui pengetatan pemeriksaan atas kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan nasional, normalisasi, transfer muatan, E-Tilang, hingga penindakan melalui tahap P21,” jelasnya.

Mendukung pernyataan Dirjen Budi, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, Denny Michels Adlan dalam laporannya menyatakan, “Berdasarkan hasil rekapitulasi selama tahun 2020, total penindakan angkutan barang di seluruh UPPKB BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 63.770 kendaraan dan di UPPKB Kemang selama tahun 2020 kendaraan yang ditindak adalah sebanyak 18.616 kendaraan atau 29% dari total keseluruhan penindakan Jawa Barat yang secara nasional menempatkan UPPKB Kemang sebagai peringkat ke 1 UPPKB yang aktif melakukan penindakan Transfer Muatan kendaraan angkutan barang.”

Lanjutnya, di tahun 2021 ini BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan penindakan sebanyak 32.960 kendaraan dan di UPPKB Kemang sebanyak 5.500 kendaraan di mana posisi UPPKB Kemang menempati posisi peringkat ke 3 terbanyak dari seluruh UPPKB Nasional untuk kegiatan Transfer Muatan dan menjadikan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebagai BPTD dengan peringkat pertama dalam realisasi denda E-Tilang selama periode 1 Januari - 20 Februari 2021.

Sebelumnya, telah dilakukan proses normalisasi kendaraan yang berasal dari 10 perusahaan dengan jumlah kendaraan yang telah dinormalisasi sebanyak 22 kendaraan dan telah dilakukan proses uji berkala di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).

“Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik jajaran Kepolisian, Pemerintah Daerah, pihak Karoseri dan pihak masyarakat yang telah memiliki kesadaran akan pentingnya kegiatan penindakan pelanggaran ODOL ini,” pungkas Denny.

Normalisasi Kendaraan *Over* Dimensi di Aceh

Normalisasi truk berlebih dimensi atau *Over Dimension* juga dilakukan di Provinsi Aceh. Menurut Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Provinsi Aceh, Mulyahadi, sebelumnya telah ada 15 truk di wilayahnya yang dinormalisasi secara sukarela.

“Untuk normalisasi truk menuju Bebas ODOL 2023 kami sudah memotong sukarela dari pengelola truk yang mengajukan ke karoseri binaan kami kurang lebih 15 truk dan ada 2 truk (*dump truck* dan *box truck*) hari ini yang kami hadirkan untuk dinormalisasi,” jelas Mulyahadi dalam kegiatan Normalisasi Truk ODOL di Terminal Tipe A Banda Aceh pada Minggu (28/3).

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi juga menitipkan pesan bagi para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh yang memiliki Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) untuk lebih memperketat pemeriksaan terhadap truk yang tidak sesuai ketentuannya.

“Mulai saat ini kendaraan truk yang tidak sesuai dimensinya apakah melalui biro jasa atau lainnya mohon tidak dilakukan pengujian. Saat ini kami tidak lagi menggunakan buku kir karena banyak yang dipalsukan,” kata Dirjen Budi.

Menanggapi kegiatan normalisasi truk ODOL di Aceh ini, Dirjen Budi menilai contoh truk di Aceh tidak terlalu terlihat pelanggaran dimensinya. “Oleh karena itu saya menitipkan kepada para Kadishub dan Dirlantas Polda walaupun di sini tidak terlalu besar pelanggarannya namun kami berterima kasih sudah ada kesadaran dari para operator di Aceh ini untuk menormalisasi kendaraannya. Saat ini kami juga menekankan aspek *law enforcement* akan dilakukan tilang namun ternyata tidak menimbulkan efek jera,” katanya.

Berdasarkan data dari Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Wilayah Aceh yaitu UPPKB Seumadam dan UPPKB Subulussalam bahwa tingkat pelanggaran ODOL di Wilayah Aceh periode Januari s.d Maret 2021 mencapai 20.000 unit kendaraan dengan jumlah kendaraan *over loading* mencapai 12.000 unit atau sebanyak 63%.

Dalam kegiatan hari ini, turut hadir yaitu Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M Daud, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah, Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Junaidi.(*)

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan pemotongan kendaraan yang *over* dimensi di Gresik, Jawa Timur, 17/3/2021. Foto: HMS DJPD/ WBW

KOLABORASI PENANGANAN ODOL

Persoalan ODOL ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga perlu kolaborasi dengan seluruh pihak. Dalam menangani ODOL dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.

Dalam menangani ODOL dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. “Saya berterima kasih atas kolaborasi semua pihak. Pemerintah akan lebih senang menangani ini ketika para pemilik logistik dan pengusaha untuk punya kesadaran menormalisasi kendaraannya. Peran masyarakat salah satunya kalau merasa terganggu jalannya rusak, juga biasanya akan lebih didengar jika sudah melakukan protes,” kata Dirjen Budi.

“Awal mula kebijakan ini adalah dari Bapak Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Kapolri yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ODOL ini. Namun peran Jembatan Timbang dalam pengawasan ODOL semakin lama semakin terasa dan semakin banyak persoalan akibat ODOL. Di Jawa Timur misalnya ada beberapa jalan penghubung antardaerah rusak dan bergelombang, salah satu pelakunya adalah kendaraan ODOL,” jabar Dirjen Budi.

Ia juga menekankan pentingnya peran pengusaha angkutan barang dalam memberantas kendaraan ODOL sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas. Untuk memperkuat usaha pemberantasan ODOL ini menurutnya juga harus diimbangi melalui tindakan pemerintah agar tidak ada korban kecelakaan yang tingkat fatalitasnya tinggi.

“Dari kami (Ditjen Hubdat) melakukan tindakan tegas melalui jalur hukum. Kami menangani ini sudah mulai dari tahun 2018. Yang dilakukan oleh Kemenhub untuk menuju Zero ODOL yaitu salah satunya dari aspek regulasi. Sifatnya *short cut* yaitu melakukan diskresi dengan Perdirjen sehingga truk yang dinormalisasi nantinya akan dapat dilakukan uji kir kembali,” tambahnya.

Kondisi jalan yang rusak (karena truk ODOL) di berbagai daerah tidak hanya terjadi pada jalan nasional juga tapi jalan provinsi dan kabupaten, sehingga dalam kesempatan ini Dirjen Budi memohon untuk dilakukan pengawasan oleh Kepala Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Menurutnya peran Kadishub ini akan semakin terlihat seiring mulai dilakukannya akreditasi uji kir di daerah. “Uji kir tidak hanya soal pendapatan daerah saja, mohon disampaikan pada Kepala Daerah dan DPRD nya juga harus menjamin adanya kendaraan yang berkeselamatan. Selain itu dalam penanganan ODOL tidak hanya peran Pemerintah saja, namun juga hadirnya peran pengusaha. Ini adalah kerja bersama maka perlu juga peran serta karoseri, pemilik barang, dan pengusaha. Marilah jangan saling menyalahkan, semuanya harus bergerak,” urai Dirjen Budi.

Dirjen Budi juga meminta kepada pihak-pihak terkait bahwa persoalan ODOL ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga harus diberantas oleh seluruh pihak. “Jangan sampai kita terlambat menyadari bahwa hal ini dapat merugikan banyak pihak, tidak hanya mengakibatkan korban jiwa namun negara turut dirugikan dengan anggaran untuk perbaikan jalan yang rusak akibat banyak kendaraan yang melanggar ODOL,” kata Dirjen Budi.

Pemerintah berkomitmen agar Indonesia bebas *Over Dimension Over Loading* (ODOL) pada tahun 2023. Untuk mencapai hal tersebut berbagai cara dilakukan antara lain adanya kebijakan penanganan ODOL dan penyelenggaraan UPPKB, Penindakan P21 terhadap kendaraan ODOL, Kebijakan Normalisasi Kendaraan, Penegakan Hukum di UPPKB dan Transfer muatan kendaraan yang biayanya dibebankan pada operator. Dengan demikian diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi para operator dan pemilik barang.

Proses Implementasi Pelaksanaan Penegakan Hukum pelanggaran ODOL butuh komitmen kerjasama antar instansi baik Kemenhub, Kepolisian, maupun Dishub daerah.

Dirjen Budi menyatakan bahwa seluruh BPTD di Indonesia saat ini sudah mengganjar pelanggaran ODOL dengan pasal 277 UU 22 Tahun 2009, untuk menimbulkan efek jera.

Dalam Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercantum bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

“Nantinya kendaraan-kendaraan yang melanggar akan dikembalikan ukurannya sesuai standar. Dengan demikian diharapkan sebagai contoh agar kepada pengusaha transportasi barang yang memiliki kendaraan ODOL untuk segera melakukan normalisasi kendaraannya sesuai ketentuan,” tegas Dirjen Budi.(*)

Mengawal Transportasi Darat di Tanah Rencong

LIPUTAN KHUSUS BPTD WILAYAH I ACEH

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Provinsi Aceh yang dipimpin oleh Ir. Mulyahadi saat ini memiliki 408 pegawai yang terdiri dari 102 ASN dan 306 PPNPN.

Sesuai dengan tupoksinya, BPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

BPTD Wilayah I Provinsi Aceh saat ini mengelola dan mengawasi 5 terminal, yaitu:

1. Terminal Tipe A Batoh Banda Aceh dengan luas 9.796 m2 yang melayani 10 bus AKAP dan 40 bus AKDP.
2. Terminal Tipe A Paya Ilang dengan luas 9.798 m2 yang melayani 5 bus AKAP dan 22 AKDP.
3. Terminal Tipe A Langsa dengan luas 20.080 m2 yang melayani 8 bus AKAP dan 23 AKDP.
4. Terminal Tipe A Lhokseumawe melayani 11 bus AKAP dan 57 AKDP. Terminal Lhokseumawe masih dalam proses pengalihan ke Kementerian Perhubungan karena permintaan Pemda untuk relokasi terminal. Untuk sementara BPTD Wilayah I Aceh mengoperasikan terminal lama dengan luas kurang dari 10.000 m2.
5. Terminal Tipe A Meulaboh dengan luas 25.000 m2. Masih ada kendala terkait pembebasan jalan akses masuk oleh Pemda Kabupaten Aceh Barat. Sehingga saat ini yang dioperasikan adalah bus AKDP DAMRI Perintis. Tapi saat ini sedang diupayakan bus AKDP dari PO lain bisa dioperasikan di terminal walau terbatas jalan akses masuk ke terminal.

Selain mengelola 5 terminal, BPTD wilayah I Aceh juga mengelola 2 UPPKB atau lebih dikenal dengan jembatan timbang, yaitu UPPKB Seumadam dengan luas 4.014 m2 dengan 53 orang pegawai dan UPPKB Subussalam dengan luas 5.600 m2 dengan 16 pegawai.

UPPKB Seumadam selama tahun 2020 telah memeriksa 48.423 kendaraan truk dengan total daya angkut 43.547 ton. Karena ada sejumlah pelanggaran UPPKB Seumadam melakukan tilang terhadap 1.050 kendaraan dan yang diteruskan ke Kepolisian sebanyak 62 kasus. Sedangkan di UPPKB Subussalam selama tahun 2020 melakukan penilangan terhadap 90 truk. Kedua UPPKB tersebut telah menggunakan timbangan elektronik.

Mengingat Provinsi DI Aceh sebagian wilayahnya berbatasan dengan laut bahkan beberapa kabupaten berada di pulau, BPTD Wilayah I Aceh juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan beberapa pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, yaitu: Pelabuhan Balohan, Lamteng, Laut, Bubon, Labuhan Haji, Sinabang, Pulau Banyak, Gunung Sitoli, Singkil, Pelabuhan Perikanan Serapong dan Ulee Lheue.

Dari 9 trayek yang dilayani, 3 lintasan bersifat komersial sedangkan sisanya 6 lintasan perintis. Adapun kapal yang melayani rute tersebut ada yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry juga swasta.(*)

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan pemotongan kendaraan yang over dimensi di Aceh, 28/3/2021. Foto: HMS DJPD/BYU

Kunjungan Kerja Dirjen Hubdat ke Aceh

PENGUSAHA ANGKUTAN DI ACEH SUKARELA POTONG TRUK SENDIRI

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan apresiasinya atas kesadaran pengusaha angkutan truk yang secara sukarela memotong sendiri atau mengajukan diri untuk normalisasi di karoseri.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi selama dua hari (27-28 Maret 2021) melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan sarana dan prasarana yang ada di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh, antara lain melakukan normalisasi kendaraan truk over dimensi serta melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Di Terminal Tipe A Batoh Banda Aceh, Dirjen Budi yang didampingi Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik dan Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ahmad Yani melakukan dialog dengan Korsatpel Terminal Tipe A Batoh, Hariyanto dan Kepala BPTD Wilayah I Aceh, Mulyahadi.

Kepada Korsatpel Terminal, Dirjen Budi minta agar dilakukan pemisahan ruang tunggu antara calon penumpang yang akan berangkat dengan pengantar. Kios-kios pedagang juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak membuat terminal terlihat kumuh.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk perbaikan dan penambahan fasilitas di Terminal Tipe A Batoh, Banda Aceh,” kata Budi.

Fasilitas yang akan diperbaiki antar lain ruang tunggu yang memisahkan antara calon penumpang dengan pengantar dan perbaikan kanopi yang menghubungkan antara terminal kedatangan dengan terminal keberangkatan.

“Nanti akan ditindaklanjuti oleh Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Pak Popik. Kita bisa pakai anggaran siaa kontrak di Direktorat Prasarana,” katanya.

Dirjen Budi juga meninjau Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang belum lama ini diserahterimakan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh kepada Dinas Perhubungan Provinsi Aceh.

Selain meninjau kapal-kapal yang melayani ke sejumlah pelabuhan lain di Provinsi Aceh juga meninjau dermaga penunjang.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Junaidi meminta bantuan dan dukungan kepada Kementerian Perhubungan untuk membangun pelabuhan plengsengan untuk kapal-kapal penumpang yang akan sandar ke Pelabuhan Ulee Lheue. Detail Engineering Desain nya sudah selesai, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 80 miliar.

Atas permintaan tersebut Budi berjanji akan mempelajarinya, termasuk alokasi anggarannya apakah menggunakan anggaran tahun 2021 atau 2022. Karena pelabuhan masih di kelola pemerintah provinsi, kalaupun Kementerian Perhubungan membantu pembangunan dermaga, sifatnya hibah.

Dalam kunjungan kerjanya ke Aceh Dirjen Budi juga sempat melakukan normalisasi truk Over Dimensi Over Load (ODOL).

Dalam kesempatan tersebut Budi menyampaikan apresiasinya atas kesadaran pengusaha angkutan truk yang secara sukarela memotong sendiri atau mengajukan diri untuk normalisasi di karoseri.

Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam pertemuan dengan Dirjen Budi, menyampaikan permintaan bantuan dan dukungannya untuk pembuatan break water penahan gelombang di Muara Bubun di Kabupaten Aceh Barat.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi memberikan pernyataan kepada media di sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, 28/3/2021. Foto: HMS DJPD/BYU

Di wilayah tersebut terdapat potensi tambang batu bara dan emas yang belum tergali. Sementara itu kondisi gelombang sering mengakibatkan kapal tidak bisa sandar.

Itulah sebabnya Gubernur minta pemerintah pusat dibuatkan break water. “Tapi biayanya mahal lebih dari Rp 400 miliar,” tukasnya.

Mulyahadi berharap kunjungan Dirjen Perhubungan Darat ke Provinsi Aceh memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Aceh. Ia juga berharap, pemerintah pusat bisa mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan.(*)

Peran BPTD Aceh Mengelola Transportasi Darat

Tak dapat dipungkiri ketersediaan anggaran berperan penting dalam mensukseskan program pembangunan di daerah. Namun demikian, permasalahan anggaran tidak menyurutkan semangat BPTD Aceh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengelola transportasi darat di wilayah Provinsi Aceh.

Dari kiri ke kanan: PPK PJU, S. Hidayah; Kasie TSDP, Abdul Syukur Sawali; Kepala BPTD I Aceh, Mulyahadi; Kasie Sarana Prasarana, Fahni Mauludi. Foto: HMS DJPD/BYU

BPTD Wilayah I Aceh memiliki 10 Satpel, terdiri dari 5 Terminal Tipe A yaitu Terminal Batoh, Langsa, Lhokseumawe, Paya Ilang dan Meulaboh, 2 UPPKB yaitu di Seumadam dan Subulussalam serta 3 penyeberangan yaitu Ulee Lheue, Singjil dan Labuhan haji. Baru-baru ini ditambah lagi satpel Pelabuhan penyeberangan Sabang, Meulaboh dan Sinabang. Khusus yang 3 terakhir, sifatnya hanya pengawasan.

"Karena terbatasnya anggaran, maka anggaran yang ada difokuskan untuk operasional dan gaji pegawai serta pembelian obat untuk ketahanan tubuh pegawai Satpel. Di luar itu tidak ada anggaran, kecuali untuk perawatan dan perbaikan," ujar Mulyahadi.

Hambatan dan Tantangan

Provinsi Aceh terdiri dari 23 kabupaten/kota yang lokasinya tersebar di gunung, pantai bahkan di tengah pulau. Setiap tahunnya ada Musrenbang yang di dalamnya banyak usulan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, mulai dari pemasangan rambu dan marka jalan, hingga pembangunan dermaga penyeberangan. "Usulannya kami tampung dan dimasukkan dalam pagu kebutuhan," jelas Mulyahadi.

Namun seringkali terdapat beberapa kendala dalam pengusulan anggaran, seperti kurangnya data dukung perencanaan terutama yang bukan menjadi aset Kementerian Perhubungan.

Ada juga pelabuhan yang memerlukan pemeliharaan atau peningkatan fasilitas, namun pelabuhan tersebut belum diserahkan ke Ditjen Hubdat atau masih di kuasai Dinas Perhubungan kabupaten/ kota.

Contoh lain misalnya dalam pengadaan sarana berupa alat uji dan gedung uji kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota atau melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). "Banyak Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota yang mengajukan proposal ke BPTD untuk dibuatkan unit pengujian kendaraan, gedung beserta peralatannya. Ya sudah pasti ditolak oleh pusat lah," kata Mulyahadi.

Ada juga Dinas Perhubungan Kabupaten yang minta anggaran ke BPTD untuk pembuatan marka jalan, rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan. Padahal jalan yang minta dipasang rambu adalah jalan kabupaten.

Persoalan lain, terkadang usulan yang disampaikan dinas kabupaten/kota tidak masuk dalam rencana strategis di bagian perencanaan Ditjen Perhubungan Darat.

Akibatnya banyak usulan yang disampaikan oleh daerah tidak bisa dilaksanakan. "Catatan saya paling hanya sekitar 30 persen usulan daerah yang bisa direalisasikan. Itu pun kadang Bupatinya minta langsung ke Pak Menteri Perhubungan," tukas Mulyahadi.

Salah satu Bupati yang langsung menyampaikan permintaan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi adalah Bupati Simeulue Erli Hasim yang menghadap langsung Menteri Perhubungan dengan membawa proposal.

Bupati Erli minta Kemenhub membangun satu lagi dermaga penyeberangan, karena satu dermaga yang ada tidak mampu menampung saat *peak season.*

Karena pelabuhan Sinabang melayani kapal-kapal dari Pelabuhan Bubon, Labuan Haji, Pulau Banyak. Kadang dalam satu hari bisa datang bersamaan.

Kabupaten Simeulue dalam tahun 2022 juga akan mendapat 4 bus perintis yang pengoperasiannya dilakukan oleh Damri Cabang Aceh. Pada pagi, siang dan sore atau jam-jam sekolah, bus perintis dipakai untuk angkutan sekolah. Diluar itu dapat dimanfaatkan untuk masyarakat umum.

Peran BPTD

Peran BPTD Wilayah I Aceh dalam membangun infrastruktur transportasi sudah lumayan banyak, mulai pelabuhan, terminal, Area Traffic Control System (ATCS) hingga rambu jalan.

Misalnya membangun baru Terminal Tipe A Paya Ilang, Takengon di Kabupaten Aceh Tengah. Terminal yang dibangun tahun 2006 dirobohkan dan dibangun ulang. Terminal yang memiliki luas keseluruhan 9.800 m2 dibangun dengan nilai Rp 20,47 miliar. Juga rehabilitasi Terminal Tipe A Langsa dengan anggaran sekitar Rp 9,5 miliar.

Tahun anggaran 2021, BPTD Wilayah I Aceh juga sudah membangun Area Traffic Control System (ATCS) di 9 titik di Kota Banda Aceh dengan nilai Rp 11,564

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Aceh

Pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas sistem pengendalian lalu lintas secara terkoordinasi dan saling terhubung atau terkoneksi dengan seluruh (9) simpang, yaitu Simpang Lima, Simpang 4 Kodim, Simpang 4 PU, Simpang 4 Jam, Simpang 4 Dodik, Simpang 4 Ketapang, Simpang 4 AMD, Simpang 3 Seulawah dan Simpang 3 Peuniti. Total anggarannya Rp 11,564 miliar.

Tahun anggaran 2021 juga telah diselesaikan pembangunan perlengkapan jalan, seperti pemasangan rambu-rambu, delineator, marka jalan, paku jalan, cevron, penerangan jalan umum konven di sejumlah kabupaten.

Misalnya dari batas Bireun ke Kota Takengon sepanjang 62,22 kilometer, dari Batas Aceh Utara/Aceh Timur ke Peureulak sejauh 65,48 kilometer dan di 23 kabupaten/kota lainya sejauh 2.102 kilometer dimana dua terletak di pulau luar yaitu di Kabupaten Sabang dan Simeulue, yang menyedot anggaran sekitar Rp 16,58 miliar

Kendala Monitoring

Dalam melakukan pengawasan Kepala BPTD Wilayah I Aceh sangat mengandalkan laporan dari Satpel. Komunikasi melalui jaringan telepon selular menjadi andalan, mengingat jauhnya lokasi satpel dengan Kantor BPTD di Banda Aceh. "Satpel yang paling dekat hanya Terminal Batoh dan Pelabuhan Ulee Lheue," kata Mulyahadi.

Terminal Paya Ilang di Takengon jaraknya sekitar 8 jam perjalanan darat. Ke Terminal Langsa lebih lama lagi bisa sampai 10 jam. Untuk sampai ke UPPKB Seumadam bisa 11 jam dan ke UPPKB Subulussalam bisa 12 jam. Jangan dikira jalannya mulus, tapi melewati hutan dan jalan berkelok.

Dibutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan monitoring ke pelabuhan. Sebagai contoh untuk melakukan monitoring ke pelabuhan Sinabang di Kabupaten Simeulue pergi pulang dibutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Sungguh membutuhkan perjuangan untuk tetap melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan transportasi darat di Tanah Rencong.(*)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan pejabat terkait usai peresmian dan acara pembukaan Sumatera Roadshow 2021 With PerpalZ TV, Jakarta, 14 Maret 2021.

DUKUNGAN PADA PENGUSAHA OTOBUS UNTUK TERUS BANGKIT DI TENGAH PANDEMI

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama satu tahun lamanya, mendorong para pelaku usaha transportasi darat untuk bangkit bersama karena telah menggerus permintaan layanan hingga 70%.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung berbagai upaya yang dilakukan para pelaku usaha otobus, untuk membangkitkan usahanya di tengah pandemi Covid-19. Salah satu upaya tersebut adalah adalah melalui gerakan "Kebangkitan Transportasi Darat dari Pandemi dan Kampanye Keselamatan Angkutan Jalan".

Gerakan ini berupa sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, terkait fasilitas-fasilitas yang menjadi unggulan di moda transportasi darat, seperti bus. "Saya mendukung gerakan ini, karena media sosial saat ini sangat baik untuk mempromosikan tentang transportasi darat, khususnya kepada para generasi muda," kata Menhub saat membuka "Roadshow Sumatera 2021", yang diselenggarakan Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), di Jakarta, Minggu (14/3).

Menhub mengatakan, promosi di media sosial tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa bertransportasi dengan bus di masa pandemi ini sudah aman. Sehingga, pelaku usaha angkutan jalan dapat bangkit kembali setelah pada 2020 mengalami penurunan penumpang.

Adapun Ketua Umum IPOMI Kurnia Lesani Adnan, yang menjadi pelopor gerakan, mengatakan, kondisi pandemi berdampak langsung bagi industri angkutan jalan khususnya bus. Dia berpendapat, perlu adanya upaya bersama untuk membangkitkan industri ini, dengan memberikan harapan positif kepada pelaku usaha dan masyarakat. "Gerakan ini adalah salah satu caranya," tuturnya.

Sebagai informasi, IPOMI mengadakan Sumatera Roadshow 2021 untuk menunjukkan geliat industri transportasi darat, khususnya bus. Roadshow ini juga untuk melihat, sejauh mana infrastuktur jalan di Sumatera, jalan tol saat ini dari Lampung sudah sampai ke Palembang, sembari menunjukkan keamanan dan kenyamaan selama perjalanan menggunakan bus.

Kegiatan ini akan ditayangkan di Perpalz TV, sebuah *channel* YouTube yang dibentuk IPOMI. Kanal ini berisi konten khusus dunia otomotif dan transportasi darat di Indonesia, baik tentang sejarah, teknologi, regulasi dan perkembangan dunia transportasi darat otobus Indonesia. Melalui kanal ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dengan baik tentang perkembangan dunia otobus.(*)

Sumatera *Roadshow* 2021, Upaya Bangkitkan Industri Transportasi Darat

Founder dan Host PerpalZ TV, Kurnia Lesani Adnan mengatakan kondisi pandemi berdampak langsung bagi industri transportasi darat khususnya bus.

Untuk itu perlu adanya upaya bersama untuk membangkitkan industri akibat pandemi ini dengan memberikan harapan positif kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Salah satu caranya melalui mempertemukan para *stakeholders* dan pelaku usaha bus untuk membahas bisnis angkutan bus dan bagaimana bisnis dilakukan kedepannya, serta menginformasikan tentang perkembangan terbaru dunia bus termasuk infrastruktur pendukungnya.

"Diharapkan dengan Sumatera Roadshow 2021 With PerpalZ TV ini menunjukkan geliat industri transportasi darat khususnya bus. Roadshow ini juga akan melihat seperti apa infrastuktur jalan di Sumatera, jalan tol saat ini dari Lampung sudah sampai ke Palembang dan kita ingin menunjukkan keamanan dan kenyamaan selama perjalanan menggunakan bus," ujar Sani dalam acara pembukaan Sumatera Roadshow 2021 With PerpalZ TV, di Jakarta, Minggu (14/3).

Roadshow ini ingin menunjukkan angkutan bus dapat menjadi pilihan masyarakat sebagai sarana transportasi yang aman, nyaman dan handal, didukung semakin canggihnya teknologi bus saat ini, baik teknologi mesin, pendingin udara, kursi, ban, karoseri, hingga pelumas.

Sumatera Roadshow 2021 ini akan berlangsung mulai 15 Maret 2021 hingga 3 April 2021 dengan awal keberangkatan dari Jakarta langsung menuju Palembang dengan menggunakan jalan tol Jakarta-Merak, menyeberang ke Bakauheni, langsung masuk tol Trans Sumatera menuju Palembang.

Dari Palembang perjalanan akan turun ke Lampung, lalu melintasi pesisir barat menuju Bengkulu, lalu ke Jambi, Padang, kemudian naik ke Pekanbaru, dan Kota Medan Sumatera Utara. Roadshow ini akan menempuh total jarak sekitar 6.300 kilometer pergi pulang. Selain itu juga akan meliput daerah-daerah wisata dan kekayaan kuliner daerah yang ditemui di sepanjang perjalanan. Diharapkan, liputan ini bisa membantu bangkitnya pariwisata di daerah yang juga terimbas oleh Pandemi Covid-19.

Sumatera Roadshow 2021 ini akan menemui lebih dari 25 pelaku usaha bus di Sumatera, Perpalz TV akan mengulik sejarah, teknologi, regulasi dan perkembangan dunia transportasi darat khususnya otobus di Indonesia.

Di Sumatera Barat, PerpalZ TV juga akan menyambangi perusahaan otobus yang sudah sangat tua, yang surat izinnya diterbitkan oleh Belanda sekitar tahun 1930-an. Cerita sejarah bagaimana perusahaan otobus itu bisa berdiri dan terus bertahan hingga kini, tentu sangat menarik, dan bisa menjadi informasi berharga bagi pengusaha otobus lainnya.

Seremoni pembukaan dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Minggu (14/3). Penutupan akan dilakukan di Medan, di mana akan banyak pengusaha otobus dari Sumatera Utara dan Aceh akan berkumpul di Medan dan berbincang bersama.

PO Bus di Sumatera yang akan dikunjungi Sumatera Roadshow 2021 With Perpalz TV ini yakni:

Palembang: PO Epastar dan PO Yoanda Prima
Lampung: PO Gumarang Jaya Bersama, Puspa Jaya (Bareka), PO PHB, PO Armada Penantian.
Bengkulu: PO SAN , PO Putra Raflesia, PO CSH, PO Putra Simas
Jambi: PO Family Raya Ceria
Padang: PO Transport, PO ANS, PO NPM
Pekanbaru: AJAP (Antar Jemput Antar Propinsi) dan AJDP (Antar Jemput Dalam Propinsi)
Medan: PO Intra, PO Makmur, PO Bintang Utara Putra, PO Medan Jaya Simalem, PO RAPI, PO ALS, PO Putra Pelangi (Aceh), PO PMTOH (Aceh), PO Kurnia Group (Aceh), PO Sempati Star(Aceh).(*)

Bus Perintis yang Merintih

Selama ini, penyelengaraan bus keperintisan identik dengan kondisi jalan yang rusak. Hendaknya, imajinasi ini harus dihilangkan, pasalnya tidak akan banyak daerah yang ekonominya akan berkembang. Prasarana jalan yang rusak tidak akan memberikan kelancaran mobilisasi orang dan barang. Prasarana jalan menjadi prasyarat sebelum dioperasikan angkutan jalan perintis.

Hakekat pemberian subsidi bagi angkutan perintis adalah lokasi pelayanan untuk menghubungkan antara daerah terisolir, terpencil dan tertinggal, tidak ada penyelenggaraan layanan transportasi lainnya dan secara aspek bisnis belum atau tidak menguntungkan.

Penyelenggaraan subsidi angkutan jalan perintis berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019. Ada dua kriteria untuk menetapkan angkutan jalan perintis, yaitu faktor finansial dan faktor keterhubungan.

Kriteria faktor finansial berupa tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesbilitas angkutan antardaerah masih rendah; trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah.

Sedangkan kriteria faktor keterhubungan dapat berupa menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia; melayani daerah yang terkena dampak bencana alam; dan melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis atau Angkutan udara perintis

Dalam hal pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk angkutan orang harus memenuhi kriteria (a) memiliki trayek tetap dan teratur; (b) sifat pelayanan tidak boleh terhenti; (c) tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh angkutan umum lainnya; (d) lokasi keberangkatan dan kedatangan berupa terminal, halte, atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda; (e) mencantumkan informasi trayek dan tarif pada terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda; (f) memberikan pelayanan angkutan paling sedikit 1 keberangkatan dalam setiap hari; dan (g) menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% dari jumiah kendaraan yang dioperasikan.

Melalui penyelenggaraan angkutan jalan perintis diharapkan dapat mengembangkan potensi perekonomian daerah. Keberadaan bus keperintisan sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau sarana transportasi umum secara optimal.

Demikian pula dengan jenis kendaraan yang dioperasikan haruslah tidak hanya dapat mengangkut penumpang, akan tetapi diberikan ruang untuk penempatan barang. Lain halnya dengan angkutan perkotaan yang memang digunakan hanya untuk mengangkut orang.

Bus keperintisan diselenggarakan pertama kali tahun 2001 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penyelenggaraan angkutan jalan perintis saat itu untuk 12 provinsi dengan 74 trayek layanan. Pada saat itu, subsidi yang diluncurkan sebesar Rp 4,6 miliar dan belum ada bantuan armada bus. Baru tahun 2004 ada program bantuan armada bus sejumlah 5 unit bus. Berikutnya, setiap tahun diadakan pengadaan armada bus untuk setiap membuka trayek baru atau menggantikan armada bus yang sudah rusak atau berakhir masa operasinya. Terakhir program bantuan armada bus itu diberikan tahun 2016 sebanyak 200 unit bus.

Pelayanan angkutan jalan perintis sudah berlangsung 20 tahun dan diselenggarakan di 32 provinsi. Pada tahun 2021, pemerintah mengucurkan Rp 134,9 miliar untuk 324 trayek di 32 provinsi. Jumlah subsidi angkutan jalan perintis masih lebih kecil dibandingkan dengan subsidi KA (Rp 3,4 triliun), angkutan umum perkotaan (Rp 500 miliar).

Bus Keperintisan di Kalbar

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah provinsi yang dioperasikan 4 trayek angkutan jalan perintis.

Pertama, trayek Sintang - Nanga Mau - Nanga Tebidah melayani jarak 112 kilometer. Secara umum kondisi jalur hampir 70 persen tanah merah dan bebatuan. Kerusakan parah terjadi pada ruas jalan antara Nanga Mau menuju Nanga Tebidah dengan panjang jalan yang rusak sekitar 20 kilometer. Kondisi jalan yang berlubang dalam dan berlumpur. Kondisi itu juga dipengaruhi dengan kondisi cuaca. Apabila hujan, membuat jalur menjadi rusak, sehingga waktu tempuh relatif bertambah 1 jam hingga - 1 jam 30 menit. Namun, jika musim panas, tanah berdebu. Waktu tempuh trayek mini berkisar 5-6 jam.

Kedua, trayek Ketapang - Kendawangan - Manis Mata (218 kilometer). Kondisi jalur yang cukup parah berada di ruas Desa Klampai - Tugu Blantak. Sekitar km ke 130an dari Ketapang, kerusakan jalur tersebut secara akumulatif sekitar 20 kilometer dalam kondisi rusak dan berlubang dalam. Total waktu tempuh perjalanan trayek ini selama 6-7 jam.

Ketiga, rute Bengkayang - Jagoi Babang sejauh 106 kilometer. Kondisi jalur beraspal beton dan kondisi baik. Trayek ini tidak memiliki masalah transportasi.

Keempat, rute Badau - Puring Kencana sepanjang 49 kilometer. Kondisi jalur jalan provinsi relatif dalam keadaan rusak (60 persen), sehingga kadang jalur poros perusahaan sawit (jalan sawit) menjadi opsi lalu lintas bus keperintisan. Jalur bus keperintisan pada trayek ini juga melintasi sungai dengan mengikuti arus aliran sungai di daerah Kecamatan Nanga Kantuk. Perjalanan di trayek ini ditempuh selama 2-3 jam.
Trayek bus keperintisan yang melintasi kondisi jaringan jalan rusak masih cukup banyak.

Bus keperintisan sedang melintas di jalan sepanjang 20 kilometer yang kondisinya berupa tanah merah di trayek Sintang-Ngada (112 kilometer)

Hampir di setiap provinsi yang menyelenggarakan angkutan jalan perintis dapat ditemukan trayek yang melintasi jalan rusak. Bahkan ada trayek bus keperintisan yang melintas aliran sungai tanpa jembatan. Kendati aliran sungai itu tidak begitu deras. Tetapi, saat tiba musim hujan, bus keperintisan tidak dapat beroperasi.

Sudah barang tentu dengan kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan waktu tempuh bertambah lama, armada bus cepat rusak, ketidaknyamanan terjadi.

Jika kondisi jalan rusak sejak awal beroperasi bus keperintisan dipertahankan, sampai kapanpun wilayah tersebut tidak akan berkembang maju dan tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap bus keperintisan.

Namun dalam membuka layanan bus keperintisan, seharusnya dapat dipastikan terlebih dulu urusan kondisi jaringan jalan sudah baik, sehingga ketika bus keperintisan beroperasi dapat melancarkan mobilitas orang dan barang yang diangkut.

Untuk mengoptimalkan program subsidi penyelenggarakan angkutan jalan perintis sesuai tujuan awal, maka Kementerian Perhubungan dapat mendiskusikan dengan Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kemen. BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Rintihan bus keperintisan segera berlalu, daerah yang dilayani segera dapat berkembang perkonomiannya.(*)

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

MANAJEMEN ANGKUTAN PARIWISATA PERLU DIBENAHI

SDM dan Manajemen perusahaan Bus Pariwisata perlu dibenahi agar kejadian kecelakaan lalu lintas yang fatal tidak terulang. Keselamatan adalah investasi yang semestinya jadi perhatian setiap pelaku bisnis angkutan pariwisata. Gencarnya promosi pengembangan pariwisata di Nusantara jangan sampai menjadikan angkutan pariwisata mengabaikan aspek keselamatan.

Bus Pariwisata Sri Padma Kencana terjun ke jurang di Tanjakan Cae, Jalan Raya Wado-Malangbong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 10/3/2021

Kecelakaan Bus Pariwisata PO Sri Padma Kencana di Sumedang, Rabu (10/3/2021) seakan mengagetkan kita setelah dalam setahun terakhir tidak terjadi kecelakaan serupa. Kecelakaan ini terjadi di Tanjakan Cae, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu malam menyebabkan 29 orang tewas. Kecelakaan serupa terakhir terjadi pada Senin (24/12/2019), Bus PO Sriwijaya jatuh ke jurang di Liku Lematang, Desa Prahu Dipo, Kecematan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan menyebabkan 35 orang penumpang tewas. Bisnis PO Sriwijaya akhirnya ditutup operasinya.

Agar tidak terulang, dilakukan inspeksi mendadak, Dishub setempat dan Polisi mendadak melakukan pemeriksaan sejumlah bus pariwisata di beberapa ruas jalan yang masuk ke daerahnya. Namun, hal seperti ini tidak akan menjadi efek jera bagi pengusaha bus pariwisata abal-abal. Karena hanya pengecekan dokumen, namun tidak ditindaklanjuti dengan temuan lainnya, seperti berapa jumlah armada bus yang dimiliki perusahaan, punyakah tempat penyimpanan kendaraan dan bengkel. Sepertinya, ini upaya yang sia-sia dan akan berulang lagi jika tidak diiringi pembenahan yang komprehensif.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, salah satu syarat untuk mendirikan perusahaan angkutan umum pariwisata, minimal memiliki 5 armada bus. Batasan minimal tersebut bermakna agar terjaga kerlanjutan bisnis angkutan umum.

Hal itu sudah diatur Pasal 37, untuk memperoleh izin sebagai angkutan umum, Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan (a) memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan; (b) memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan (c) menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Secara umum, faktor utama terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas adalah manusia, sarana, prasarana dan lingkungan. Akan tetapi yang sering dibenahi bukan manusianya, baru sebatas aspek sarana, prasarana dan regulasi. Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) adalah salah satu pembenahan yang terkait dengan faktor manusia. Jika SMK berjalan dengan baik dan konsisten di semua perusahaan angkutan umum, sudah barang tentu akan turut mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Sekarang sudah mulai dilakukan pembenahan SMK tersebut yang targetnya selesai tahun 2025. Mungkin perlu penambahan anggaran dan SDM supaya target bisa lebih cepat lagi selesai.

Tahun 2020, salah satu Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) di Sumatera bersama Polisi dan PT Jasa Raharja pernah melakukan inventarisasi keberadaan bus pariwisata. Hasilnya, mayoritas bus pariwisata tidak berizin, baik plat kuning maupun plat hitam. Kemudian, para pengusaha itu didorong untuk mengurus perizinan melalui aplikasi SPIONAM juga terganjal kelengkapan dokumen kendaraan. Mayoritas kendaraan bus tersebut berasal dari Pulau Jawa dan ada kartu pengawaspun sudah kadaluarsa. Praktek seperti ini harus segera dibenahi, karena pasti akan berpengaruh pada manajemen keselamatan perusahaan.

Pengawasan bus pariwisata di jalan dan di lokasi wisata juga dapat jadi bumerang, karena risikonya harus menyediakan bus pengganti. Akhirnya, operasional bus pariwisata sama sekali tidak terawasi. Termasuk kemajuan atau progres untuk perolehan perizinan membuka usaha bus pariwisata resmi, karena harus penyesuaian terlebih dulu dokumen perusahaan dan kendaraan yang cukup menyita waktu dan biaya.

Dampak di lapangan, bus pariwisata beroperasi dengan kondisi seadanya. Sangat minim atau tanpa pengawasan baik dari petugas Ditjen Hubdat dengan keterbatasan anggaran, maupun petugas di Dinas Perhubungan di daerah selain anggaran juga merasa bukan kewenangannya.

Jika kondisi angkutan pariwisata seperti di atas, tinggallah berdoa jika bus wisata apakah selamat atau tidak saat beroperasi. Sekarang, pemerintah sedang menggencarkan program pariwisata di seluruh pelosok Nusantara. Keberadaan bus pariwisata menjadi salah satu andalan untuk dapat memberikan akses dan membawa pelancong sebanyak mungkin mengunjungi lokasi wisata.

Seorang pengemudi bus pariwisata tidur di bagasi bus saat parkir di Taman Khusus Parkir Senopati, Jogjakarta, (1/7/2019). Foto: GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Sudah barang tentu, bisnis angkutan umum wisata akan turut meningkat. Kemudahan untuk membuka peluang bisnis angkutan wisata dapat lebih dipermudah. Namun jangan sampai mengabaikan atau menghindari aspek keselamatan. Keselamatan adalah investasi, sehingga memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Dalam penyelenggaraan transportasi, keselamatan mutlak harus dipenuhi tanpa ada kompromi. Kewenangan penyelenggaraan angkutan pariwisata berada di Ditjenhubdat. Sekarang di daerah sudah ada 25 Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) di 34 provinsi, sehingga dapat membantu membina dan mengawasi operasional bus pariwisata.

Waktu Kerja Mengemudi

Di sisi lain, jika pengemudi kurang istirahat yang cukup, bisa jadi menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Dan hal ini akan membahayakan pengguna jalan dan penumpang di dalam bus pariwisata itu sendiri.

Masih ditemukan sejumlah pengusaha bus pariwisata tidak memerhatikan jam kerja pengemudi, menyebabkan diabaikannya keselamatan. Waktu kerja mengemudi sudah diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa (1) setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum paling lama 8 (delapan) jam sehari, (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam, dan (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Selanjutnya, sanksinya di dalam Pasal 92, (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Umum dikenai sanksi administratif; (2) Sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis; (b) pemberian denda administratif; (c) pembekuan izin; dan/atau (d) pencabutan izin.

Seharusnya, Kementerian Ketenagakerjaan dapat membuat Peraturan Menteri yang mengatur tentang waktu kerja, waktu istirahat dan waktu libur pengemudi. Juga mengatur standar gaji atau honor untuk pengemudi angkutan pariwisata.

Ditambah lagi tempat istirahat di lokasi wisata dan menginap pengemudi yang katanya sudah

diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perlu dipertegas lagi dengan mengecek setiap lokasi wisata dan penginapan, apakah sudah benar-benar menyediakan tempat istirahat yang layak bagi pengemudi bus pariwisata?

Ditjen Hubdat harus memeriksa dan menindak perusahaaan angkutan pariwisata abal-abal. Jika perusahaan hanya memiliki satu armada bus, tentunya akan memaksimalkan keuntungan dengan satu bus itu. Bahkan, mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan.

Surat Izin Mengemudi dan Pelatihan Pengemudi

Selagi Jenderal Sulistyo Sigit baru menjabat Kapolri, dapat memasukkan program perbaikan sistem pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi angkutan umum untuk orang dan barang.

Sistem yang diselenggarakan sekarang ini tidak menjamin pengemudi angkutan benar-benar memiliki kompetensi sebagai pengemudi yang memahami tertib berlalu lintas di jalan raya. Sudah saatnya ada pembaruan sistem pengujian dan penertiban SIM tersebut.

Pengemudi harus memiliki kecakapan mengemudi kendaraan. Pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki kecakapan atau kompetensi memadai cenderung mengabaikan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

Pelatihan bagi pengemudi bus pariwisata sangat penting dilakukan sacara rutin. Minimal setahun sekali diadakan pelatihan, penyegaran dan peningkatan kompetensi bagi pengemudi oleh Kemenhub. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan dapat ditugaskan menyelenggarakannya.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono meninjau lokasi kecelakaan Bus Pariwisata PO Sri Padma Kencana, Sumedang, 11/3/2021.

Petugas Polri sedang memeriksa kendaraan Uji Praktek SIM B1/B2.

Penumpang menggunakan sabuk keselamatan. Foto: PerpalZ TV

Forum Angkutan Pariwisata

Tahun 2018 pernah digagas adanya Forum Angkutan Pariwisata oleh Ditjen Hubdat dengan melibatkan para pemangku kepentingan (seperti praktisi, akademisi, komunitas, asosiasi), termasuk sejumlah kementerian dan lembaga (Kemenhub, Kemen. PUPR, Kemenpar, Korlantas Polri, Kemendagri, Kemenaker, Kemendiknas) yang ada di pemerintahan.

Sayangnya, hingga kini forum tersebut belum terwujud. Tujuan dibentuknya forum tersebut adalah sebagai wadah untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan angkutan pariwisata. Dengan adanya forum ini, setidaknya dapat membantu untuk mengurangi masalah berlarut-larut yang belum terselesaikan, sehingga dapat diambil keputusan terbaik.

Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam upaya melindungi warganya terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satu caranya, mengingatkan warganya agar tidak menggunakan angkutan pariwisata yang tidak terdaftar di Kemenhub. Terutama sekolah-sekolah yang kerap menggunakan bus pariwisata untuk kegiatan *study tour* atau kunjungan ke tempat wisata bersama. Pengurus sekolah cenderung memilih tawaran harga yang murah, bukan mencari memilih yang ada jaminan keselamatan, seperti pengusaha bus pariwisata terdaftar pada portal website SPIONAM Kemenhub, kendaraan sudah lulus uji kir, pengemudi memiliki sertifikat kompetensi.

Himbauan dan peringatan tidak menggunakan bus resmi terdaftar di Kemenhub dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan di daerah.

Kewajiban Sabuk Keselamatan

Mengenakan sabuk keselamatan atau *safety belt* bagi pengemudi atau penumpang menjadi hal yang wajib. Aturan itu sudah ada di pasal 57 (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlengkapan kendaraan roda empat atau mobil wajib ada sekurang-kurangnya terdiri atas sabuk keselamatan, ban cadangan dan segitiga pengaman. Juga wajib membawa dongkrak, pembuka roda serta membawa peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas (P3K).

Sesungguhnya, semua penumpang bus umum setiap tempat duduk wajib dilengkapi sabuk pengaman dan penumpang sudah diwajibkan menggunakannya. Tujuannya, agar ketika terjadi kecelakaan yang tidak diduga, fatalitas korban dapat ditekan.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Komiter Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada setiap kecelakaan transportasi bertugas melakukan investigasi, memberikan rekomendasi, saran dan pendapat kepada Presiden dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang cukup fatal, tentunya KNKT akan memberikan catatan khusus ke berbagai instansi yang berkaitan dengan keselamatan transportasi perihal apa yang harus dilakukan perbaikan, penyempurnaan dan penambahan, supaya kejadian serupa tidak terulang.

Instansi yang mendapatkan catatan khusus tersebut janganlah menganggap hal itu sebagai beban kerja. Namun ini adalah kewajiban bersama yang memang harus segera dibenahi agar masyarakat yang bepergian ada jaminan keselamatan bertransportasi.

Sudah saatnya keselamatan menjadi kebutuhan kita bersama, sehingga jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Dan seandainya ada terjadi kecelakaan lalu lintas tidak sampai ada korban jiwa.

Pembenahan harus komprehensif, bukan hanya oleh Kementerian Perhubungan, akan tetapi terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja, Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, industri otomotif, ahli otomotif, ahli manajemen transportasi, ahli keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelusuran penyebab terjadinya kecelakaan di Sumedang jangan berhenti pada kesalahan pengemudi dan dijadikan tersangka, walau sudah mendapat SP3, karena pengemudi turut meninggal dunia. Namun harus didalami keterlibatan pengusaha bus pariwisata (PO Sri Padma Kencana) dan pengusaha bus yang menjual armada bus (PO Subur Jaya) ke pengusaha bus pariwisata. Harus ditindaklanjut tuntutan ke ranah hukum. Supaya tidak ada lagi pengusaha mengoperasikan bus pariwisata, tetapi tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai pengusaha bus pariwisata.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

E-BLU READER SI PEMBACA KARTU BLUe

***E-BLU Reader* adalah alat identifikasi keaslian bukti lulus uji elektronik (BLUE). *E-BLU Reader* sebanyak 70 set diserahterimakan kepada Politeknik Transportasi Darat, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia dan 25 BPTD seluruh Indonesia.**

Guna memperkuat sarana di bidang keselamatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Rabu (17/2) lakukan serah terima *E-BLU Reader* kepada 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD).

"*E-BLU Reader* ini merupakan Alat identifikasi Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) sebagai pendukung pelayanan Penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang dapat membantu mempermudah pengawasan terhadap maraknya pemalsuan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam sambutannya.

Menurut Dirjen Budi, hal ini sangat merugikan masyarakat dan pemilik kendaraan yang tidak mengetahui adanya pemalsuan BLUe tersebut dan tentunya sangat berdampak terhadap terjadinya kecelakaan.

"Dengan adanya serah terima *E-BLU Reader* ini, Ditjen Perhubungan Darat akan terus berupaya membangun program-program untuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan terintegrasi," tegas Dirjen Budi.

Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi menegaskan seperti yang telah diprogramkan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan yang tujuannya untuk percepatan dalam peningkatan kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor dan upaya dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan guna mendukung Program Indonesia Bebas ODOL *(Over Dimension Over Loading)* Tahun 2023.

"Apabila melihat kondisi saat ini, jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi masih sangat terbatas di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karena itu saya sangat mendukung program pemenuhan fasilitas dan peralatan untuk pengujian berkala kendaraan bermotor seperti kendaraan uji keliling. Sehingga pelayanan uji berkala masih dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien," ucap Dirjen Budi.

E-BLU Reader adalah alat identifikasi keaslian bukti lulus uji elektronik (BLUE). Foto: HMS DJPD/WBW

Penyerahan Sejumlah Peralatan Keselamatan Ke Daerah

Bersamaan dengan acara serah terima *E-BLU Reader* juga dilakukan penyerahan secara simbolis *Retro Reflector Meter,* Kendaraan Uji Keliling, dan Kendaraan Operasional untuk Peningkatan Pelayanan Bidang Sarana.

Dalam laporannya Direktur Sarana Transportasi Jalan, M. Risal Wasal mengatakan, "*Retro Reflector Meter* adalah alat yang bertujuan untuk membantu memastikan

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyerahkan E-BLU Reader kepada Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD), Hindro Surahmat, Bekasi, 17/2/2021. Foto: HMS DJPD/WBW

E-BLU Reader, alat identifikasi keaslian bukti lulus uji elektronik (BLUe)

Retro Reflector Meter

Alat Pemantul Cahaya yang terpasang pada kendaraan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Adapun pada hari ini sebanyak 26 unit *Retro Reflector Meter* diserahkan kepada BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat),

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), dan Kepolisian Republik Indonesia," tutur Risal.

Selain itu juga dilakukan penyerahan Unit Pemeriksa Laik Fungsi Kendaraan Bermotor Non Statis atau disebut dengan Kendaraan Uji Keliling sebanyak 5 (lima) unit kepada BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT, BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat, BPTD Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah, BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, dan BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

"Serta penyerahan sebanyak 30 (tiga puluh) unit Kendaraan Operasional untuk peningkatan pelayanan bidang sarana kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)," ucap Risal.

Adapun kegiatan lainnya yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan hari ini yakni *Capacity Building* yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari sejak Selasa (16/2) lalu dengan memberikan materi tentang pelatihan Kendaraan Peningkatan Pelayanan Bidang Sarana (Kendaraan Uji Keliling) dan penggunaan *E-BLU Reader*. Selanjutnya pada hari Rabu (17/2) dilanjutkan dengan *Capacity Building Safety Driving* Kendaraan Listrik sebagai komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tambahnya lagi, Risal mengatakan pada kesempatan yang baik ini juga akan dilakukan sosialisasi peraturan alat pemantul cahaya, yang dilanjutkan dengan Demo Penggunaan alat uji alat pemantul cahaya serta *coaching clinic safety driving* kendaraan listrik.

Dengan adanya kegiatan ini, Dirjen Budi juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kemudahan pelayanan dan semua pihak yang berkontribusi di dalamnya dapat terus berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan Bidang Teknologi Informasi agar bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang tercinta ini.

"Tidak lupa juga saya mengimbau kepada para Kepala BPTD dan jajarannya untuk segera menindaklanjutinya dan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat untuk segara mengoperasikan seperti Kendaraan Uji Keliling yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," tegas Dirjen Budi.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah, Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) se-Indonesia, Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Yusuf Nugroho, Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD), Hindro Surahmat, dan Perwakilan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Abdul Haris Firmansyah.(*)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Kasatreskrim Polres Malang AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo menunjukkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu yang ditemukan di UPPKB Singosari, Malang, Kamis (27/8/2021). Foto: HMS DJPD/ABA

PENJARA BAGI PEMALSU BLUe

Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur, telah menetapkan 3 orang terdakwa dinyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara atas kasus pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe).

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menemukan adanya pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dan Kartu Uji Berkala. Pengadilan Negeri Kepanjen telah menetapkan 3 orang terdakwa dinyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara atas kasus pemalsuan tersebut melalui 3 putusan berbeda. Sebanyak 1 paket dokumen BLUe dan 3 buah Kartu Uji Berkala teridentifikasi palsu di Malang, Jawa Timur.

Dalam keterangannya terkait pemalsuan BLUe dan Kartu Uji Berkala ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menjelaskan bahwa terdakwa Karyawanto dibantu rekannya Abdai Rotomy dan Agus Hariyanto adalah biro jasa yang memalsukan BLUe.

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam putusan bernomor 664/Pid.B/2020/PN.Kpn menjatuhkan vonis pidana 1 tahun penjara kepada Karyawanto. Kemudian dalam putusan nomor 694/Pid.B/2020/PN.Kpn, Karyawanto divonis pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, sementara rekannya, Abdai Rotomy divonis pidana penjara selama 9 bulan. Dalam 2 putusan tersebut, Karyawanto mendapat hukuman 2 tahun 3 bulan penjara. Sementara itu, Agus Hariyanto melalui putusan nomor 693/Pid.B/2020/PN.Kpn divonis penjara selama 9 bulan.

"Barang bukti yang ditemukan dalam salah satu kasus dengan terdakwa Karyawanto yakni antara lain 1 paket dokumen BLUe palsu, 19 Kartu Uji Berkala asli, 3 buah Kartu Uji Berkala palsu, 1 unit truk Mitsubishi nopol N 9452 UA (termasuk STNK dan kunci kontak). Adapun ketiga Kartu Uji Berkala yang palsu tersebut yakni dengan rincian nomor N 4999868 atas nama Sumardiyah, nomor L 869022 atas nama Sugeng Harijono, dan nomor M 686823 atas nama Yacob Mantalik, juga 1 unit ponsel," urai Dirjen Budi.

Menurut Dirjen Budi, pihaknya akan terus mengevaluasi dan melakukan pengawasan dengan ketat khususnya di beberapa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) wilayah Jawa Timur.

Kejadian ini semula diketahui oleh Kepala Satpel UPPKB Singosari, Bambang Kartika. Dengan adanya putusan pidana ini Dirjen Budi berharap dapat menimbulkan efek jera pada para pemalsu BLUe dan Kartu Uji Berkala.

"Semoga dengan adanya kasus ini maka semakin banyak masyarakat yang memahami ciri umum fisik dokumen dan manfaat BLUe dan juga tidak mudah tergoda tawaran dari biro jasa. Saya mengerti ada potensi pemalsuan dokumen BLUe yang bisa saja terjadi di wilayah UPPKB lainnya, oleh karena itu kami akan memperketat pengawasan untuk ke depannya. Saya juga perlu menegaskan bagi para PPNS Perhubungan yang bertugas agar lebih jeli lagi dalam menemukan pemalsuan seperti ini," ucap Budi.

Ke depannya, Dirjen Budi berharap pihaknya dapat memberikan sosialisasi terarah kepada pemerintah daerah, petugas UPPKB, pemilik usaha maupun kendaraan, dan pihak terkait lainnya terkait Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu dapat disusun tata cara dan prosedur kewenangan penindakan PPNS dalam pengawasan angkutan jalan serta melakukan pelatihan bagi PPNS agar memahami prosedur sesuai hukum yang berlaku.(*)

Sesditjen Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono; Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Cucu Mulyana; Direktur PT. ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi; Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat dan pejabat terkait lainnya meresmikan Dermaga II Pelabuhan Bolok dan Pengoperasian 2 Unit Kapal di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 10/3/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

PERESMIAN DERMAGA II PELABUHAN BOLOK DAN 2 UNIT KAPAL UNTUK NTT

Angkutan penyeberangan di NTT memang sangat penting untuk menghubungkan antar wilayah dari kota hingga pelosok. Oleh sebab itu diharapkan kerja sama dari pemerintah daerah jika ada hal-hal atau kegiatan yang bersifat infrastruktur di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyampaikan apresiasi kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang telah berhasil melakukan proses revitalisasi dan rehabilitasi Dermaga II Pelabuhan Bolok di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono yang turut hadir bersama Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Cucu Mulyana menyampaikan, "Angkutan penyeberangan di NTT ini memang sangat penting untuk menghubungkan wilayah dari kota hingga pelosok. Oleh sebab itu saya harapkan kerja sama dari Gubernur jika ada hal-hal atau kegiatan yang bersifat infrastruktur di lingkungan Kementerian Perhubungan. Karena kita sudah dapat Pelabuhan yang cantik ini jadi kami harapkan masyarakat NTT dapat memelihara dengan baik," kata Marta pada Rabu (10/3).

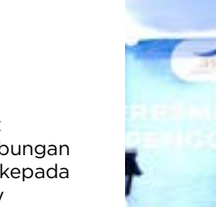

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengucapkan terima kasih PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) karena telah berdedikasi dalam memberikan layanan angkutan penyeberangan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 40 lintas penyeberangan dengan rincian 24 lintas komersial dan 16 lintas perintis yang dilayani oleh 14 unit kapal. 14 unit kapal tersebut terdiri dari 10 unit kapal yang dilayani BUMN, 3 unit kapal dari BUMD dan swasta 1 unit.

Di Pelabuhan Bolok sendiri melayani 22 lintas penyeberangan yang terdiri dari 8 lintas penyeberangan komersial dan 14 lintas perintis, seluruhnya adalah lintas dalam provinsi. 22 lintas penyeberangan tersebut dilayani oleh 11 unit kapal yaitu 10 kapal PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan 1 kapal dari swasta yaitu PT. Multi Guna.

Dalam kegiatan Pengoperasian Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Kupang hari ini juga dilakukan kegiatan Peresmian Pelayaran Perdana KMP. Jatra I dan KMP. Namparnos.

"Kami tetap berkomitmen membangun dengan pelayanan. Dermaga ini tadi kapasitasnya untuk kapal 1.000 GT dikembangkan menjadi 5.000 GT. Untuk KMP. Namparnos melintas menuju Semau, tadinya seminggu 3 kali menjadi tiap hari, mudah-mudahan dapat membuat pariwisata Semau semakin baik,"

Sejumlah pejabat dari Kementerian Perhubungan, dan Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur usai peresmian Dermaga II Pelabuhan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 10/3/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

kata Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi.

Sementara itu lintasan yang akan dilayani oleh KMP. Jatra I yaitu Kupang-Rote, Kupang-Kalabahi, dan Kupang-Larantuka. KMP. Jatra I memiliki volume 3.871 GT.

Sebelumnya pada tahun 2020 produksi angkutan di Pelabuhan Bolok mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Di tahun anggaran 2021, nilai subsidi operasional kapal penyeberangan perintis yang dialokasikan pada 16 lintas di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.40,6 Miliar.

Ada 6 tujuan yang akan dicapai dalam revitalisasi dermaga II Pelabuhan Bolok dan Pengoperasian Kapal ini yaitu:

1. Menjamin keselamatan pelayanan pelabuhan, mengingat pelabuhan telah memasuki usia desain teknis sehingga perlu dilakukan revitalisasi;
2. Meningkatkan kinerja angkutan penyeberangan untuk mengantisipasi pertumbuhan *demand* angkutan;
3. Mengurangi terjadinya stagnasi di pelabuhan;
4. Memberikan pelayanan dengan jadwal tetap dan teratur untuk kelancaran pendistribusian logistik;
5. Menjadi *feeder* bagi angkutan laut atau komplemen tol laut sehingga dapat menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok di masa pandemi;
6. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi wilayah NTT dan sekitarnya di masa pandemi Covid-19.

KMP Jatra I sedang bersandar di Pelabuhan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 10/3/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

KMP Jatra I dioperasikan untuk melayani lintasan Kupang-Rote3, Kupalang-Kalabahi, dan Kupang Larantuka

Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat berterima kasih karena telah didorong kehadiran sektor transportasi di wilayahnya. "Sebagai Provinsi kepulauan, kami tidak ada pilihan untuk tidak mendorong transportasi baik darat, laut, maupun udara. NTT akan punya transportasi penyeberangan seperti ini. Kita akan ke Rote saja susah," kata Viktor.

Viktor berharap nantinya antar pulau di NTT menjadi satu kesatuan *ring of beauty* dengan ciri khas alam yang berbeda dapat tersambungkan dengan kehadiran kapal dan dermaga ini.

Hadir juga dalam acara hari ini yaitu Direktur Operasional Jasa Raharja Putera Rahmat Slamet, Walikota Kupang Jefirstson R. Riwu Kore, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, Danlantamal VII Laksamana Pertama I Gusti Kompiang Aribawa, dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Nusa Tenggara Timur Tito Gesit Utiarto.(*)

KUNJUNGAN KE JEMBATAN TIMBANG DI BREBES

Usai kunjungan kerja di Cirebon, Menhub melanjutkan kunjungan kerja ke Brebes untuk meninjau Jembatan Timbang Tanjung yang berada di Brebes. Keberadaan jembatan timbang yang saat ini dikelola Kemenhub diharapkan dapat menyelesaikan masalah truk yang *over dimension* dan *over load* (ODOL), yang berpotensi membahayakan keselamatan dan merusak jalan.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan fungsi jembatan timbang dalam melakukan pengawasan terhadap truk ODOL. Salah satunya yaitu mengenakan kewajiban transfer muatan terhadap truk ODOL.

“Sekarang kita lakukan perubahan skema, kalau tadinya kita tilang, sekarang dilakukan dengan dengan transfer muatan. Kalau tilang dendanya hanya 150 sampai 200 ribu, itu murah sekali dan kurang bisa memberikan efek jera dan tidak sebanding dengan kerugian yang disebabkan kendaraan ODOL seperti : terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan,” ucap Dirjen Budi.

Dirjen Budi mengatakan, penerapan skema transfer muatan telah mendapat dukungan dari para kepala daerah.

“Sudah banyak kepala daerah yang mendukung, mulai Gubernur, Bupati dan Walikota. Kami masih menoleransi hingga tahun 2023, kendaraan logistik yang muatannya melebihi hingga 50 persen akan kita transfer muatannya ke kendaraan lain,” kata Dirjen Budi.(*)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Direktur Sarana Transportasi Jalan Risal Wasal mengunjungi Terminal Harjamukti Cirebon (12/3/2021). Foto: BKIP

MENHUB KUNJUNGI TERMINAL HARJAMUKTI CIREBON

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Cirebon untuk meninjau progres pembangunan/revitalisasi Terminal Harjamukti dan uji coba kendaraan uji kir keliling (non statis) yang tengah dilakukan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Direktur Sarana Transportasi Jalan Risal Wasal.

“Terminal Harjamukti sudah mulai dibangun, artinya ada warna baru, desain baru, dan suasana baru. Saya berpesan agar dalam pembangunan ini, selain dapat mengoptimalkan pelayanan, tetapi jangan lupa juga harus mengekspos kearifan lokal. Misalnya di Cirebon ada batik, harus diekspos batiknya. Karena kearifan lokal itu menjadi sesuatu yang baik bagi suatu daerah,” kata Menhub.

Menhub mengapresiasi jajaran Ditjen Perhubungan Darat yang telah berupaya melakukan pembangunan dan telah melakukan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah. Menhub meminta progres pembangunan ini dapat dimonitor dengan baik sehingga bisa diselesaikan tepat waktu.

Lebih lanjut Menhub berharap, pengelolaan terminal Harjamukti dapat melibatkan pihak swasta untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN yang terbatas.

“Bayangkan kalau kita ada 100 terminal, setiap titik harus kita biayai, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Di sisi lain, pemerintah banyak membangun infrastruktur transportasi lainnya di seluruh Indonesia. Karena APBN kita tidak banyak, saya mengharapkan agar pembangunan terminal ini bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta. Supaya terminal bisa membiayai dirinya sendiri melalui *capex* atau *opex*,” kata Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Menhub juga meninjau uji coba penerapan kendaraan uji kir keliling. Kendaraan ini memiliki kontainer besar yang dilengkapi dengan alat uji rem, roda, alur ban, alat ukur dimensi, alat ukur emisi gas buang, alat uji kebisingan, daya pancar dan kegelapan kaca.

Menhub mengapresiasi inovasi yang dilakukan Ditjen Perhubungan Darat, dalam upaya memecahkan masalah uji kir di daerah. Menhub berharap, konsistensi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah di Cirebon dan sekitarnya bisa dilakukan dengan baik, karena ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama yang baik antara Kemenhub dan Pemda.

“Ini kejutan dari Pak Dirjen Perhubungan Darat. Kendaraan uji KIR keliling ini nanti akan kita berikan kepada BPTD Jawa Barat yang akan melakukan uji kir. Satu alat itu bisa mencakup 3-10 kabupaten. Saya pesan ke rekan-rekan petugas agar menjaga dengan baik aspek keselamatan dan lingkungannya,” tutur Menhub.(*)

TSDP

MENHUB RESMIKAN DERMAGA II TELAGA PUNGGUR DI BATAM

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan pengoperasian Dermaga II Pelabuhan Telaga Punggur yang dibangun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada Kamis (25/2), di Batam, Kepulauan Riau.

“Ini tandanya negara hadir. Walaupun di tengah pandemi kami tetap berkomitmen untuk membangun konektivitas, khususnya pada angkutan penyeberangan,” kata Menhub.

Menhub mengatakan, konektivitas laut di Kepri mutlak diperlukan karena wilayahnya terdiri dari pulau-pulau kecil dan 96% wilayahnya adalah lautan. Dengan adanya angkutan penyeberangan ini, membantu masyarakat di Kepri untuk melakukan mobilitas sehari-hari.

“Konektivitas laut antar pulau adalah milik masyarakat kebanyakan, khususnya di Kepulauan Riau. Mereka membutuhkan angkutan penyeberangan yang berkeselamatan untuk bisa sampai ke kampung halaman dari Batam, atau yang akan menuju ke Batam untuk bekerja,” ucap Menhub.

Menhub mengapresiasi PT ASDP yang telah melakukan upaya yang tidak mudah untuk membangun dermaga ini, di tengah kondisi keuangan perusahaan yang sedang kurang baik karena terdampak pandemi.

Lebih lanjut Menhub mengimbau perlu adanya kerja sama dan kolaborasi yang baik antara Kemenhub, PT ASDP dengan Pemerintah Daerah tingkat 1 maupun tingkat 2, untuk menyediakan angkutan penyeberangan yang berkeselamatan dan terjangkau.

“Jadi kita kolaborasi secara bersama-sama, misalnya Pemda bisa berperan untuk ikut membangun dermaga dan memberikan subsidi tarif. Karena kegiatan angkutan penyeberangan ini merupakan bisnis yang marjinal sekali dan tidak bisa menerapkan tarif yang terlalu tinggi. Semoga dengan kolaborasi yang baik ini akan semakin banyak pulau-pulau di Kepri yang bisa dilayani, sehingga bisa memberikan makna yang baik bagi masyarakat,” tuturnya.(*)

LALU LINTAS

DITJEN HUBDAT TERBITKAN SE PEMBATASAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG SELAMA PERBAIKAN TOL CIPALI

Selepas kejadian longsornya jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) pada Senin (8/2), maka pada Rabu (10/2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) mengeluarkan Surat Edaran nomor SE.3/AJ.005/DRJD/2021 tentang Pembatasan Operasional Angkutan Barang Selama Masa Konstruksi Perbaikan Permukaan Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang Amblas di KM 122 + 400 Arah Jakarta.

Adapun SE tersebut ditetapkan untuk menjamin kelancaran lalu lintas selama masa kontsruksi perbaikan permukaan jalan Tol Cipali yang amblas tersebut.

Dalam tanggapannya membahas SE tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengungkapkan bahwa pembatasan operasional angkutan barang ini ditetapkan bagi mobil barang sumbu 3 atau lebih, dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandeng, serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian, tambang, dan bahan bangunan.

“Pembatasan operasional angkutan barang berupa pengalihan arus lalu lintas ini berlaku pada jalan tol Jakarta-Cikampek-Cikopo-Palimanan menuju ke jalan arteri. Pengalihan arus berlaku sejak Kamis, 11 Februari hingga Minggu, 28 Maret atau selama masa perbaikan jalan. Meski demikian pembatasan ini akan menyesuaikan kebijakan dari Polri,” jelas Dirjen Budi.

Bagi mobil barang dari arah barat ke arah timur akan dilakukan pengalihan mulai dari Simpang Susun Cikunir, Gerbang Tol Bekasi Barat, Gerbang Tol Bekasi Timur, Gerbang Tol Cikarang Barat dan akan diperketat di Gerbang Tol Cikampek/Cikopo, kemudian diperkenankan masuk kembali di Gerbang Tol Palimanan.

“Sementara bagi yang ke arah barat akan dilakukan pengalihan mobil barang ke jalan arteri pantura mulai dari Gerbang Tol Kendal dan diperketat di Gerbang Tol Palimanan IV dan masuk kembali di Gerbang Tol Cikampek/Cikopo,” kata Dirjen Budi.

Ia juga memerintahkan Direktur Lalu Lintas Jalan dan Direktur Angkutan Jalan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan pembatasan operasional angkutan barang ini. Melalui SE tersebut dituliskan juga bahwa beberapa instansi harus melakukan koordinasi terkait implementasi pembatasan operasional angkutan barang, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ditjen Hubdat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi/ Kabupaten/Kota, juga Badan Usaha Jalan Tol.(*)

PRASARANA

ANTISIPASI CUACA BURUK, DITJEN HUBDAT KOORDINASIKAN SIMULASI GANGGUAN SISTEM TRANSPORTASI

Puncak musim hujan, sesuai data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terjadi pada periode Januari-Februari 2021. Saat ini 95 % wilayah Indonesia tengah memasuki musim hujan sedangkan 5% wilayah masih mengalami musim kemarau. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhu-bungan Darat meminta masyarakat, operator, maupun petugas di lapangan untuk mewaspadai adanya potensi Bencana Alam yang akan berdampak pada terganggunya kelancaran sistem transportasi.

Dalam rapat yang digelar pada Kamis (19/2), Ditjen Hubdat mencatat ada beberapa gangguan sistem transportasi akibat bencana alam yang disebabkan curah hujan tinggi.

"Selama periode Januari-Februari 2021, kami melihat ada beberapa kejadian seperti banjir di jalan nasional Bandung-Garut pada 9 Januari, Banjir di Kalimantan Selatan pada Januari kemarin, longsor di ruas jalan nasional Wonogiri-Yogyakarta- Pacitan pada 28 Januari, penutupan jalan nasional Madiun-Surabaya akibat banjir di Jombang 5 Februari lalu, dan yang terbaru amblasnya Tol Cipali," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam rapat tersebut.

Dirjen Budi menambahkan mengenai kerusakan Jembatan Rembun di Pekalongan-Pemalang, diharapkan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), PT. Jasa Marga, dan PT. Pemalang-Batang Toll Road dapat berkoordinasi untuk membuka segera Exit Tol Bojong secara fungsional untuk pengalihan arus.

Sementara terkait Jalur Lintas yang meng hubungkan Kalteng - Kalsel mengalami beberapa kerusakan terutama pada Lintas Andil Bakti Km 17 dimana terjadi kerusakan jalan dan jembatan diharapkan segera dilakukan perbaikan agar tidak terjadi antrian panjang truk barang yang mengangkut barang penting.

Dalam paparannya pada rapat hari ini, Pelaksana Harian Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Eko Prasetyo menyatakan potensi hujan SEDANG hingga LEBAT dalam seminggu ke depan secara umum dapat terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan tinggi yakni terganggunya sistem logistik nasional, keselamatan serta mobilisasi masyarakat pengguna jalan akan terganggu, serta kerusakan infrastruktur karena kerusakan jalan akibat longsor dan banjir. Oleh karena itu kami akan segera menyampaikan surat kepada Para Gubernur, Dirjen Bina Marga, dan Kakorlantas Polri perihal Antisipasi Terhadap Kerawanan Bencana Alam karena kondisi cuaca," jelas Dirjen Budi.

Sementara dari BMKG menjabarkan bahwa dalam prakiraan cuaca berbasis dampak, di prakirakan propinsi-propinsi yang terdampak banjir dalam status siaga adalah Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Pada wilayah selatan Indonesia berpotensi memiliki tekanan udara yang rendah sehingga bisa menjadi bibit badai tropis dan angin kencang. (*)

TSDP

DIRJEN HUBDAT KONFIRMASI KMP DOROTHY SEMPAT KANDAS DI MERAK

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengonfirmasi kandasnya KMP. Dorothy milik PT. Damai Lintas Bahari di alur masuk Pelabuhan Merak pada Rabu (24/2) kemarin. Kejadian tersebut tepatnya terjadi di alur masuk Pelabuhan Merak pada kordinat 05°56.271S/ 105°59.655 E.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam keterangannya menyampaikan bahwa KMP. Dorothy berangkat dari Pelabuhan Bakauheni pukul 16.18 WIB dan telah berada di sekitar Merak pukul 18.00 WIB. "Saat itu kapal tengah menunggu perintah Ship Traffic Control (STC) untuk masuk alur. Pukul 19.45 atas perintah STC kapal diperintahkan untuk ke alur masuk. Saat itu kondisi mesin maju kanan, pelan sekali karena dalam posisi menunggu KMP. Raputra Jaya 888 sandar di dermaga 3 yang kesulitan sandar. Namun karena kondisi buoy merah padam dan tidak terlihat sehingga kapal terseret arus ke kiri dan kandas menempel ke buoy merah," urai Dirjen Budi.

Saat ini menurutnya kondisi sudah lepas kandas pada dini hari tadi. Kondisi muatan kapal saat kandas yakni jumlah muatan sepeda motor 4 unit, kendaraan pribadi 5 unit, truk sedang 4 unit, truk besar 6 unit, tronton 4 unit, trailer 2 unit, dan jumlah penumpang 48 orang.

"KMP. Dorothy berhasil divakuasi pukul 00.45 WIB dan langsung di arahkan ke dermaga V Pelabuhan Merak untuk bongkar berlabuh dan melakukan pemeriksaan penyelaman pagi tadi. Sebelumnya kami diinfokan ada tambahan bantuan tug boat untuk KMP. Dorothy dengan TB Tirtayasa 4 dan TB. Teluk Jakarta," jelas Dirjen Budi.

Saat kejadian berlangsung menurut Dirjen Budi, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini baik kondisi penumpang dan kendaraan di atas kapal aman dan kondusif. Ia berharap ke depannya agar semua operator dan petugas kapal lebih berhati-hati dan senantiasa memeriksa kondisi cuaca. "Ada baiknya untuk terus mengantisipasi cuaca buruk dan yang terpenting kita harus selalu prioritaskan keselamatan penumpang dalam melaksanakan layanan transportasi," kata Dirjen Budi.(*)

UMUM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEWAT PADAT KARYA DI UPPKB TROSOBO

Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menggelar program Padat Karya di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Trosobo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan yang melibatkan 75 orang pekerja yang diberdayakan dari masyarakat sekitar UPPKB Trosobo ini diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Rabu (17/3) siang.

Padat Karya di UPPKB Trosobo tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur.

Dirjen Budi memaparkan bahwa kegiatan Padat Karya di UPPKB Trosobo ini adalah kegiatan Padat Karya perdana yang dilakukan Ditjen Hubdat di tahun 2021.

"Padat Karya ini untuk menjalankan amanat Bapak Menteri Perhubungan. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden karena selama pandemi Covid-19 banyak masyarakat kesulitan dalam mencari mata pencaharian. Minimal dengan program Padat Karya ini melalui kegiatan pemeliharaan yang melibatkan masyarakat sekitar akan sangat membantu sekali," kata Dirjen Budi.

Kegiatan Padat Karya kali ini melibatkan 75 orang, terutama masyarakat di sekitar UPPKB Trosobo, Sidoarjo. Dirjen Budi berharap manfaat dari program Padat Karya ini benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Saya mengapresiasi kepada BPTD Wilayah XI Provinsi Jatim yang mengadakan kegiatan Padat Karya di UPPKB Trosobo. Dalam Padat Karya pekerjaannya tidak butuh keterampilan khusus sehingga siapa saja bisa melakukannya," ucap Dirjen Budi.(*)

UMUM

KECELAKAAN BUS PARIWISATA DI SUMEDANG, 27 ORANG MENINGGAL DUNIA

Rabu (10/3) pukul 18.20 WIB telah terjadi kecelakaan tunggal yang menimpa bus pariwisata Sri Padma Kencana bernomor polisi T 7591 TB. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi yang tiba di lokasi pada Kamis (11/3) dini hari menyatakan bahwa proses evakuasi masih berlangsung.

"Kami bersama Kepolisian, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Jasa Raharja, Basarnas telah berada di lokasi. Dalam waktu dekat Satlantas Polres Sumedang akan mengirimkan crane sehingga mempermudah proses evakuasi. Jalan sekitar TKP juga akan ditutup sementara untuk kelancaran evakuasi", kata Dirjen Budi.

Jumlah penumpang bus tersebut sebanyak 65 orang dengan rincian 39 orang selamat, 26 meninggal, dan 1 orang meninggal dalam proses evakuasi. Lokasi kejadian kecelakaan tunggal tersebut di Jalan raya Wado-Malangbong di Dusun Cilangkap RT 01/06 Desa Sukajadi Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

"Penyebab kecelakaan masih dalam investigasi, sementara ini informasi yang didapat ada keterlambatan uji KIR. Saya sudah koordinasi dengan Dishub Provinsi Jawa Barat karena ini jalan provinsi, apakah dapat dipasang *guard rail* di jalan ini atau kalau jalan kelas 1 nanti mungkin bisa diganti beton," ujar Dirjen Budi. Kronologis sementara yang didapat dari kepolisian setempat mengenai kecelakaan ini yaitu bus melaju dari arah Malangbong menuju Wado. Sejumlah petugas terkait termasuk tim Ditjen Perhubungan Darat, KNKT, dan kepolisian setempat memeriksa kecelakaan tersebut.(*)

UMUM

KEMENHUB DIRIKAN POSKO DAN SALURKAN BANTUAN UNTUK KORBAN GEMPA SULBAR

Setelah Gempa 6.2 SR yang melanda Majene dan Mamuju pada Jumat (15/1) pekan lalu yang menelan 90 korban jiwa, Kementerian Perhubungan mendirikan posko bantuan. Posko tersebut didirikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan- Sulawesi Barat di Terminal Tipe A Simbuang, Mamuju.

"Dari hari pertama terjadi musibah, Terminal Simbuang telah dijadikan penampungan bagi para pengungsi. Melalui posko tersebut, Kemenhub mendirikan dapur umum untuk melayani pengungsi dengan yang menginap dengan tenda darurat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Rabu, 20 Januari.

Dalam posko tersebut menampung sebanyak 138 Kepala Keluarga atau 573 jiwa. "Dari 573 pengungsi tersebut terdapat orang dewasa sebanyak 524 jiwa, anak-anak 46 jiwa, dan ibu hamil sebanyak 3 jiwa," urai Dirjen Budi.

Ia mengharapkan agar dengan adanya posko bantuan ini dapat membantu meringankan beban para pengungsi serta mampu mendistribusikan bantuan dengan tepat sasaran bagi para pengungsi.

"Di lokasi ini juga telah didirikan dapur umum bagi para pengungsi. Sejumlah bantuan kebutuhan bahan pokok seperti sembako, air mineral, masker, peralatan kesehatan wanita, *handsanitizer*, selimut dan tenda posko telah disalurkan. Saat ini pengiriman bantuan masih sedikit terhambat mengingat pengiriman barang melalui jalan darat terkendala jalan longsor. Semoga setelah longsor ini teratasi, proses pengiriman dan penyaluran bantuan kembali lancar," pungkas Dirjen Budi.(*)

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyerahkan sapu lidi kepada peserta padat karya di Terminal Tipe A Banda Aceh, 28/3/2021. Foto: HMS DJPD/BYU

PADAT KARYA DORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi melakukan peresmian Padat Karya yang dilakukan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Provinsi Aceh pada Tahun Anggaran 2021. Kegiatan tersebut dilakukan pada Minggu (28/3) di Terminal Tipe A Banda Aceh.

Menurut Dirjen Budi, dalam pernyataannya pada acara tersebut, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional maka pihaknya menggelar kegiatan padat karya di berbagai wilayah.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Perhubungan, bahwa kondisi ekonomi Indonesia sangat terpengaruh oleh kondisi para pekerja informal sehingga Pemerintah perlu memberikan ketahanan ekonomi masyarakat dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun Pemerintah," urai Dirjen Budi.

Dirjen Budi menyatakan pula bahwa melihat kondisi yang ada maka sesuai arahan Presiden, pihaknya melaksanakan kegiatan Padat Karya ini. "Memang anggaran yang kami berikan tidak besar tetapi minimal ini mencerminkan bentuk kepedulian Pemerintah dan dapat dilakukan kegiatan serupa lainnya untuk memberikan dampak lebih banyak bagi masyarakat. Kementerian Perhubungan melaksanakan Program Padat Karya yang merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan," jabar Dirjen Budi.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Provinsi Aceh, Mulyahadi dalam laporannya menyatakan bahwa lewat kegiatan Padat Karya BPTD Wilayah I Provinsi Aceh diharapkan akan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) orang di sekitar lokasi pelaksanaan pekerjaan dan diperkirakan akan menyalurkan anggaran kepada masyarakat sebesar Rp 1 Milyar.

"Maksud dan tujuan acara ini adalah pencanangan padat karya untuk acara ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yaitu bila ada kegiatan kontraktual di suatu wilayah harus melibatkan tenaga kerja lokal. Alhamdulillah di Aceh ini kami melibatkan lebih dari 340 tenaga kerja untuk kegiatan pembangunan Terminal Takengon, Terminal Langsa, dan fasilitas jalan," kata Mulyahadi.

BPTD Wilayah I Provinsi Aceh akan melaksanakan kegiatan beberapa pembangunan fisik berupa Revitalisasi/Rehabilitasi 2 (dua) Terminal Tipe A di Aceh yaitu Takengon dan Langsa, Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan pada 6 (enam) ruas Jalan Nasional di Provinsi Aceh serta Pemasangan sistem lalu lintas Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Banda Aceh, dengan total anggaran sebesar Rp 63,1 Milliar.(*)

◀
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan pejabat terkait lainnya meninjau lokasi pameran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia "Kembali Bersepeda Untuk Indonesia Sehat dan Maju" di Stasiun Gambir, Jakarta, 17/1/2021. Foto: HMS DJPD/BYU

◀
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani, dan Kadishub DKI Syafrin Liputo meninjau Ujicoba Penerapan GeNose C19 di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta, 24/1/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

▶
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi melakukan penyerahan 2 unit bus sekolah di Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihat, Tanjung Jabung, Jambi. Selain itu juga Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, 29/1/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

◀
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Anggota Komisi V DPR RI melakukan peninjauan sarana dan prasarana (Sarpras) di Pelabuhan Merak, Banten, 5/2/2021. Foto: HMS DJPD/WBW

▲
Sesditjen Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono bersama Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus melakukan kunjungan kerja ke Terminal Sei Ambawang, serta menyerahkan bantuan bus sebanyak lima unit yang akan diserahkan kepada Universitas Nadhatul Ulama, Sekolah Tinggi Theologia Pontianak, Yayasan Persekolahan Katolik Nyarungkop, Institut Shanti Buana, dan Yayasan Helvetia Bunut di Kalimantan Barat, 5/2/2021. Foto: HMS DJPD/BYU

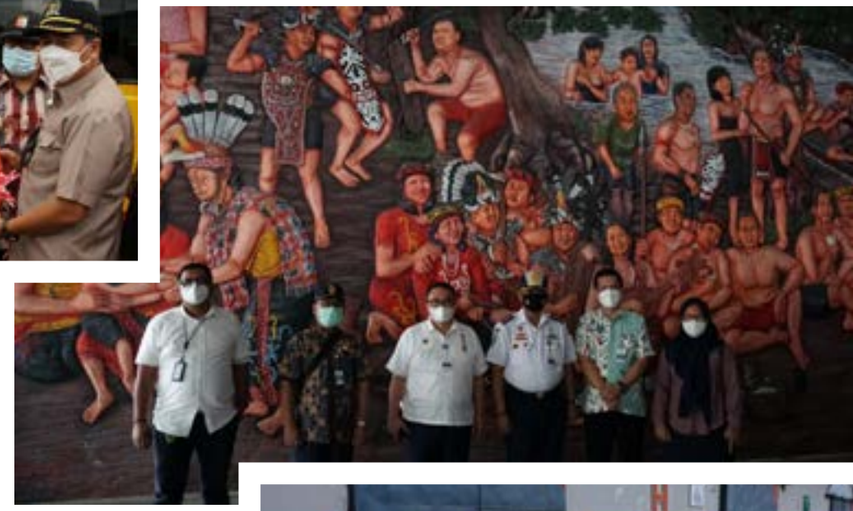

◀
Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah, bersama Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Terminal Anak Air, Padang, Sumatera Barat, 15/2/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

◀
Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah, dan pejabat terkait lainnya, mendampingi Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat, 15/2/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Kepala BPTD X Jateng-DIY, Eko Agus Susanto, didampingi Korsatpel Terminal Tirtonadi, Joko Sutriyanto meninjau Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, 10/2/2021. Foto: HMS DJPD/CAS

Kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan pejabat terkait ke Terminal Harjamukti, Cirebon, 12/3/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan arahan pada saat pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Surabaya, Jawa Timur, 17/3/2021. Foto: HMS DJPD/WBW